# PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMP KELUARGA KUDUS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh
Sri Larasanti
NIM: 34014065107

**Jurusan Hukum Kewarganegaraan**
**Fakultas Ilmu Sosial**
**Universitas Negeri Semarang**
**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Drs. Slamet Sumarto, M Pd<br>NIP 19610127 198601 1001 | Drs. Tijan, M, Si<br>NIP 19621120198702 1 001 |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP 19610127 198601 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama,

Drs. Eko Handoyo, M.Si
NIP 19640608 198803 1001

Penguji I

Drs. Slamet Sumaro, M.Pd
NIP 19610127 198601 1001

Penguji II

Drs.Tijan, M.Si
NIP 19621120 198702 1001

Mengetahui,

Dekan

Drs. Subagyo, M.Pd
NIP 19510808 1980031 00 3

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2011

Sri Larasanti
NIM 3401406507

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ✓ *Tanamkanlah kejujuran mulai dari diri sendiri*
- ✓ *Tiada Mawar Yang Tak Berduri (sesuatu yang baik pasti diperoleh dengan usaha dan kerja keras)*
- ✓ *1000 bukanlah seribu jika tanpa angka 1(dirimu bukanlah dirimu jika tanpa orang lain).*
- ✓ *Berdoa dan berusaha adalah kunci sukses untuk segalanya*

### PERSEMBAHAN

1. Allah SWT
2. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan curahan kasih sayangnya dengan tulus serta selalu memberikan arahan untukku yaitu bapakku hariyanto (ALM) dan ibuku Siti Maesaroh.
3. Buat kakak-kakakku tersayang mb.Umi, mb. Mur, mb. Kar, mb. Sutik, dan MAS Uuk.
4. Buat temen-temenku yang selalu membantuku dan memberikan motifasi yaitu Mita, Lina, Risti, Galuh, dan Rini.
5. Teman – teman seperjuangan Pkn angkatan 2006 paralel dan reguler.
6. Almamaterku UNNES

# PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, taufik, pertolongan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMP KELUARGA KUDUS".

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M. Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Si, dosen pembimbing I dan Ketua Jurusan Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Tijan, M.Si, dosen pembimbing II yang berkenan untuk senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Hukum Kewarganegaraan FIS UNNES yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang lebih kepada penulis.
6. Drs. M. Basuki .Sugita, selaku kepala sekolah SMP Keluarga Kudus yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi serta bantuan selama penelitian berlangsung.

7. Bapak dan Ibu guru serta Karyawan SMP Keluarga Kudus yang sering memberikan informasi dan bantuan selama penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu hinggga terselesainya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah berperan mendapatkan keridhoan Allah SWT. Besar harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

Semarang, Pebruari 2011

Penulis

# SARI

Larasanti, Sri. 2011. *Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.* Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

**Kata kunci: pendidikan dan antikorupsi.**

Tindakan korupsi di Indonesia semakin hari semakin merajalela bahkan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup melalui jalur hukum saja, melainkan juga melalui jalur preventif (pencegahan) yang salah satunya adalah melalui pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam upaya pembentukan kepribadian anak. Salah satu sekolah yang telah menerapkan pendidikan antikorupsi adalah SMP Keluarga Kudus.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?,(2) apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Penerlitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus, (2) mendeskripsikan apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di SMP Keluarga Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik ,wawancara, observasi dokumentasi dan studi pustaka yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus meliputi pembelajaran antikorupsi dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan melalui adanya warung kejujuran, telepon kejujuran, Gerakan Anti Mencontek (GAM), penggunaan PIN antikorupsi dan PILKAO. Dengan adanya pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus dapat membentuk sikap jujur, tanggung jawab, berani, adil terbuka, kerja keras, dan disiplin. Namun pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus belum bisa menekankan timbulnya nilai-nilai antikorupsi sampai 100% karena dalam prakteknya masih ada dijumpai perilaku yang menyimpang yaitu ada 1 atau 2 siswa yang tidak jujur.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah bosan, guru membutuhkan kretivitas dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran PAK karena kurikulumnya dibuat oleh sekolah sendiri, kurangnya waktu, sanksi bagi si pelanggar aturan sekolah lebih menekankan pada sanksi moral jadi kurang begitu tegas dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diantaranya adalah fasilitas HP di telepon kejujuran jumlahnya terbatas.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah Kepada dinas Pendidikan untuk mengintruksikan kepada sekolah lain agar mencontoh SMP Keluarga Kudus yaitu memasukkan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata pelajaran tersendiri diluar Pendidikan Kewarganegaraan, pihak sekolah lebih memperhatikan dan tegas terhadap peserta didik yang melakukan pelangggaran, bagi sekoplah agar mendokumentasikan dengan baik perangkat pembelajaran antikorupsi seperti silabus dan RPP, agar pembelajaran antikorupsi tidak membosankan maka dalam melaksanakan proses pembelajaran guru harus selektif, lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi kepada siswa, dan pihak sekolah yaitu guru atau wali kelas harus bersikap konsisten yaitu berani memasukkan nilai mata pelajaran pendidikan antikorupsi dalam rapor.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN KELULUSAN ..... iii

PERNYATAAN ..... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... v

PRAKATA ..... vi

SARI ..... viii

DAFTAR ISI ..... x

DAFTAR TABEL ..... xii

DAFTAR GAMBAR ..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xvi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

a) Latar Belakang ..... 1

b) Identifikasi dan Rumusan Masalah ..... 6

c) Tujuan Penelitian ..... 6

d) Manfaat Penelitian ..... 7

e) Batasan Istilah ..... 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Korupsi dan Antikorupsi ..... 9

B. Pendidikan Antikorupsi..... 28

BAB III METODE PENELITIAN ..... 40

1. Pendekatan Penelitian ..... 40

2. Lokasi Penelitian..... 41

3. Fokus Penelitian ..... 41

4. Sumber Data Penelitian..... 41

5. Metode Penelitian..... 42

6. Keabsahan Data..... 44

7. Metode Analisis Data..... 45

8. Prosedur Penelitian..... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

a. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SMP Keluarga Kudus.....49

2. Pelaksanaan Pendidikan Sikap Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.....56

3. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pendidikan Sikap Antikorupsi.....82

b. Pembahasan.....85

BAB V PENUTUP..... 97

A. Kesimpulan ..... 97

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA ..... 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 103

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Triangulasi ..... 48

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian ..... 50

Gambar 3. Bagan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi

di SMP Keluarga Kudu……..57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

Lampiran 4 Foto-foto kegiatan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus

Lampiran 5 Jadwal Pelajaran SMP Keluarga Kudus

Lampiran 6 Contoh Silabus PAK

Lampiran 7 Contoh Raport Siswa

Lampiran 8 Laporan Keuangan Warung Kejujuran

Lampiran 9 Bon Warung Kejujuran

Lampiran 10 Bon Telepon Kejujuran

Lampiran 11 Deklarasi Gerakan Anti Mencontek (GAM)

Lampiran 12 Jajak Pendapat / Polling Pendidikan Antikorupsi "Pak Harto Pahlawan / Koruptor"

Lampiran 13 Sumbang Saran Siswa terhadap PAK

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Melalui pendidikan maka manusia dibina dan dikembangkan menjadi manusia, yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab, dan bersosialitas. Pada umumnya pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian seseorang.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan lembaga pendidikan formal yang salah satunya adalah sekolah. Sekolah merupakan salah satu di antara pembentuk-pembentuk utama kepribadian seorang anak. Pendidikan formal yang didapat dari sekolah berupa pembentukan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap mata pelajaran. Selain di sekolah pendidikan juga dapat berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada dasarnya pendidikan di Indonesia tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek afektif dan psikomotorik sehingga dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsadan negara (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003).

Pada kenyataannya sekarang ini pendidikan di Indonesia belum begitu berhasil dalam pembentukan kepribadian untuk menjadi manusia Indonesia

seutuhnya. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kasus korupsi yang merajalela di negara kita ini. Korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di mata bangsa Indonesia bahkan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan pribadi. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia telah menjadikan Indonesia menjadi negara terkorup di dunia.

Menurut ketua dewan pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara di Asia yang perilaku korupsinya masih menonjol da terus menjadi sorotan Transparency International (TI). Sudah sekian kali TI kembali meluncurkan barometer korupsi global, dan sekian kali pula Indonesia masuk jajaran negara yang mendapatkan angka “merah” untuk korupsinya. Selanjutnya indeks Prestasi Korupsi (IPK) 2009 yang dilakukan TI dengan melakukan 13 survei oleh 10 lembaga independen yang mengukur persepsi tingkat korupsi di 180 negara di dunia. Hasilnya Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN yaitu dibawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand (Fanny Oktavianus dalam situs www.antaranews.com, diunduh tanggal 16 Januari 2010)

Sementara itu, berbagai media komunikasi baik cetak maupun elektronik selalu menanyakan berita korupsi yang terjadi diberbagai lapisan masyarakat mulai dari pejabat negara sampai pada rakyat biasa pun sudah terbiasa melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya moralitas bangsa Indonesia khususnya di mata dunia.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengeliminasi korupsi dengan dibentuknya lembaga yang ditujukan memberantas korupsi yaitu Tim Gabungan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (TGPTK) dan Komisi Pemberantasan Kekayaan Pejabat Negara Tahun 1999, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002, juga Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2005. Namun semua itu belum juga dapat menjadikan Indonesia terlepas dari korupsi secara tuntas.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi selama ini belum membuahkan hasil yang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak hanya cukup dengan tindaka hukum saja melainkan juga dengan tindakan preventif (pencegahan) yang salah satunya adalah dengan cara pendidikan karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak.

Upaya preventif terhadap tindakan korupsi bisa dimulai dengan adanya pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Pendidikan anti korupsi di sekolah tentu sangat efektif sebagai upaya edukatif mendidik generasi muda sehingga berkarakter jujur, bermoral baik, dan dapat bertanggung jawab. Tujuan pokoknya adalah mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang. Asumsinya peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut merupakan generasi masa depan yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.

Salah satu bentuk dari pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah adalah dengan adanya “kantin kejujuran”. Di kantin ini tiap pembeli boleh mengambil barang apapun di kantin tersebut, membayar dan mengambil sendiri

uang pengembaliannya. Tidak ada penjual atau penjaga yang mengawasi sehingga kalau seseorang mau bersikap tidak jujur dengan mengambil tanpa membayar atau membayar semuanya saja maka tidak ada yang tahu. Yang dibutuhkan adalah mendengarkan suara hati nurani dengan merasa di awasi pun hati dan tindakan tetap harus mewujudkan sikap jujur. Ukuran sukses atau tidaknya tujuan kantin tersebut akan lerlihat dari neraca keuangannya. Apakah secara bisnis bisa berjalan terus atau bangkrut (Rosi Sugiarto dalam situs www.detik.com, diunduh tanggal 15 Januari 2010).

Salah satu sekolah yang telah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) adalah di SMP Keluarga Kudus. Di SMP Keluarga Kudus telah melaksanakan praktek Pendidikan Anti Korupsi sejak tahun 2005 sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai kampanye antikorupsi melalui iklan televisi. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Keluarga Kudus telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari KPK.

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di mata bangsa Indonesia bahkan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat. Banyaknya korupsi di Indonesia telah menjadikan Indonesia menjadi negara terkorup di dunia.

Berbagai upaya pemerintah yelah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun selama ini belum membuahkan hasil yang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak hanya cukup dengan dengan jalur hukum saja, melainkan juga dengan jalur preventif

(pencegahan) yang salah satunya adalah melalui jalur pendidikan karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak.

Salah satu cara untuk mencegah berkembangnya siklus korupsi melalui jalur pendidikan adalah dengan pendidikan sikap antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai anti atau tidak suka terhadap tindakan korupsi kepada peserta didik sehingga peserta didik bertindak atau bertingkahlaku yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.

Salah satu sekolah yang telah menerapkan pendidikan antikorupsi adalah di SMP Keluarga Kudus. SMP Keluarga Kudus telah melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak tahun 2005 sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai kampanye antikorupsi melalui media televisi. Meskipun di SMP Keluarga Kudus telah diterapkan pendidikan antikorupsi, namun masih juga ditemukan siswa yang melanggar, misalnya siswa ketahuan membawa HP ke sekolah, mencontek pada saat ulangan, dan membeli barang di warung kejujuran tidak mau membayar atau ngutil.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kabupaten Kudus”.

## B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, antara lain:

1. Korupsi sekarang ini bukan hanya terjadi di lingkungan pemerintah dan masyarakat saja, melainkan juga terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah.
2. Praktik korupsi di lingkungan sekolah yang sering terjadi adalah banyaknya siswa yang mencontek pada saat ulangan, siswa banyak yang membolos, dan penyelundupan uang SPP dan jajan tidak mau bayar.
3. Masih pentingnya penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Keluarga Kudus?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Memberi informasi bagaimana pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

c. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi khususnya di SMP Keluarga Kudus.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi kepala sekolah guru di SMP Keluarga Kudus sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

## E. Batasan Istilah

Pembatasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah satu penafsiran pada penelitian, sehingga dapat diperoleh persepsi pemahaman yang jelas. Oleh sebab itu peneliti membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

2. Antikorupsi

Antikorupsi Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangan korupsi pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara (KPK, 2006:31).

Secara sederhana antikorupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang anti (tidak suka, tidak setuju ) terhadap tindakan atau perbuatan yang mengandung unsur korupsi.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Konsep Korupsi dan Antikorupsi

Menurut kamus wikipedia, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus atau politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengannya, degan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut *Transparency International* (TI) korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negari, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka.

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Jonhson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran-peran, jabatan-jabatan publik atau sumber-sumber untuk kepentingan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi yaitu, penyalahgunaan (*abuse*), publik (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*). Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan korupsi mula-mula adalah menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang publik yang telah dipercayakan pada dirinya, kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan

pribadinya semata, lama-kelamaan digunakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal seperti ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat bahkan sudah menjadi budaya dikalangan pejabat publik (Handoyo, 2009:16).

Klifaard (dalam Handoyo, 2009:18) memberikan definisi korupsi sebagai berikut:"Korupsi sebagai tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi".

Bracking (dalam Handoyo, 2009:18) memberikan definisi korupsi sebagai berikut:

> "Korupsi dalam konteks *administrative corruption* atau *bureaucratic corruption*, *petty corruption*, dan *graft.* Korupsi administrasi atau birokrasi adalah pembayaran haram yang diterima oleh pegawai negeri dari pengguna dalam menerapkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan hukum. *Petty corruption* merupakan tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri. *Graft* adalah pemanfaatan sumber-sumber publik untuk kepentingan individu atau pribadi".

Sir Athur Lewis secara singkat memaknai korupsi sebagai pembayaran untuk memperoleh pelayanan (*just a payment for service)* (Handoyo, 2009:18).

Menurut Alatas (dalam Handoyo, 2009:20) ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2) korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
3) korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

4) mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung korupsi dibalik pembenaran hukum.
5) setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
6) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
7) setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif
8) suatu perbuatan korupsi
melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum: penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain diantaranya: menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima grafitasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jenis-jenis korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 antara meliputi: (1) korupsi yang merugikan keuangan Negara, (2) korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap, (3) korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan, (4) korupsi yang berhubungan dengan pemerasan, (5) korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, (6) korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, dan (7) korupsi yang berhubungan dengan greatifikasi/ pemberian hadiah.

Korupsi yang dimaksud peneliti adalah korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah dan biasanya dilakukan oleh para siswa diantaranya: tidak mengerjakan tugas dari guru, terlambat masuk sekolah, membolos, mencontek, tidak membayar

jajan di kantin dan menyelewengkan uang SPP untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain.

Menurut Sarlito W. Sarwono (dalam situs www.transparansi.or.id.diunduh tanggal 16 Februari 2010) penyebab korupsi sebagai berikut.

> "Tidak ada jawaban yang persis aspek-aspek yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, tetap ada 2 hal yang jelas yaitu dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya)".

Alatas dalam Azhar (2004:46), mendeskripsikan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti berikut ini.

a) Problem kepemimpinan
b) Problem pengajaran agama dan etika
c) Latar belakang sejarah (kolonialisme)
d) Kualitas pendidikan yang rendah
e) Faktor kemiskinan dan gaji yang rendah
f) Penegakan hukum yang lemah dan buruk
g) Sistem kontrol yang tidak efektif
h) Struktur dan sistem pemerintahan
i) Problem Kepemimpinan

a) Problem Kepemimpinan

Masyarakat Indonesia menganut struktur masyarakat yang bersifat paternalistik, sehingga keteladanan para pemimpin menjadi kata kunci, karena masyarakat akan mengikuti keteladanan para pemimpin. Jika perilaku seorang figur publik yang diteladani baik, maka masyarakat akan mengikuti perilaku yang baik tersebut, demikian juga sebaliknya. Perilaku korupsi akan tumbuh subur dalam masyarakat, apabila pemimpin masyarakat melakukan korupsi. Dengan demikian maka pemimpin haruslah dapat menjadi teladan yang patut dicontoh bagi yang dipimpinnya.

b) Problem Pengajaran Agama dan Etika

Semua ajaran agama mengajarkan bahwa perbuatan korupsi dan suap menyuap merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori dosa. Tidak ada agama yang mentoleransi perbuatan korupsi, apalagi menganjurkan. Namun pada kenyataannya masalah agama dan penerapan agama hanya di tempat-tempat ibadah saja serta cenderung memisahkan antara kepentingan agama dengan kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Akibatnya ajaran agama tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam hal ini perlu diubah model dan metode atau cara didalam pengajaran agama yang sebenarnya sehingga pemeluk agama dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c) Latar Belakang Sejarah (Kolonialisme)

Dalam konteks Indonesia, warisan kolonialisme dan masa penjajahan masa lalu memiliki sumbangan yang signifikan, walaupun pada dasarnya telah tejadi perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam menentukan kehendaknya sendiri. Kolonialisme telah menyebabkan bibit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Birokrasi yang diciptakan oleh kolonialisme adalah birokrasi yang mempertahankan budaya patrimonial dan feodalisme dalam bentuk baru. Birokrasi yang demikian ini menimbulkan birokrasi nepotisme yang member jabatan atau jasa khusus pada sanak saudara dan sahabat. Dalam

lingkungan yang demikian ini berbuat korupsi dianggap sesuatu yang wajar dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai perbuatan korupsi yang terjadi.

d) Kualitas Pendidikan yang rendah

Dengan adanya pendidikan yang berkualitas maka manusia Indonesia dididik menjadi menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggungjawab, serta sadar akan hak dan kewajiban setiap warga Negara terhadap Negaranya. Namun adanya kualitas yang rendah maka tujuan pendidikan Indonesia menjadi terbalik sehingga hal ini akan mendorong munculnya praktik korupsi. Korupsi dalam hal ini bisa dimulai dari lingkungan pendidikan itu sendiri yang seharusnya mendidik manusia Indonesia malahan secara tidak langsung merusak moral bangsa Indonesia sendiri. Misalnya pada saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah favorit biasanya orangtua rela membayar sejumlah uang kepada pihak sekolah agar anaknya bisa masuk di sekolah tersebut meskipun dengan nilai yang kurang memenuhi syarat.

e) Faktor Kemiskinan dan Gaji yang rendah

Faktor kemiskinan dan gaji yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Lebih tepatnya, tejadi kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin sebagai faktor pemicu terjadinya korupsi. Keadaan tersebut ditunjang lagi oleh tumbuh suburnya sikap masyarakat yang hedonism dan konsumeristik yang dipengaruhi oleh perilaku pejabat, iklan media, radio dan lain-lainnya.

f) Penegakan Hukum yang lemah dan buruk

Hukum berfungsi ganda, disatu sisi hukum difungsikan sebagai faktor pencegahan terjadinya korupsi. Pada sisi yang lain, hukum yang lemah dan penegakan hukum yang buruk dan aparat penegak hukum yang korup akan menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Apabila hukum lemah dan penegakan hukum yang buruk tidak dapat berfungsi sebagai alat pengendali kejahatan, malah justru sebaliknya dikendalikan oleh para pelaku kejahatan.

Undang-undang korupsi yang berlaku sekarang ini terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Sistem yang berlaku memberikan ruang bagi penjatuhan pidana yang ringan. Seharusnya dalam pelaksanaan sistem Negara kita jangan ada perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun dan tehadap siapapun.

g) Sistem Kontrol yang tidak efektif

Keadaan kelompok penekan (*pressure group*) atau kontrol sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kelompok penekan muncul karena tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat sipil bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang dan mengkorupsi uang Negara adalah perbuatan jahat terencana yang merugikan rakyat banyak. Sebaliknya, peran minimal dari kelompok ini dapat melegitimasi perilaku korupsi tumbuh subur dan semakin meluas.

Seringkali masyarakat tahu tentang suatu tindak korupsi, tetapi tidak tahu harus mengadukannya kemana dan kepada siapa. Tidak jarang masyarakat juga merasa takut terhadap intimidasi dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi kemudian.

h) Struktur dan Sistem Pemerintahan

Struktur dan sistem pemerintahan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: gaji yang rendah dan sistem penggajian yang timpang dan tidak adil, rekruitmen pegawai yang tidak dapat menjaring sumber daya manusia yang terampil dan jujur, mekanisme kontrol yang lemah, promosi dan jenjang karier yang tidak transparan dan cenderung ditentukan atasan, birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien.

Amin Rais membagi korupsi dalam empat tipologi.

*a)* Korupsi *ekstortif*

Korupsi *ekstortif* merujuk pada situasi dimana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (*bribery*) kepada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan ijin usaha atau mendapatkan perlindungan terhadap usaha yang dijalankan.

b) Korupsi manipulative

Korupsi manipulative merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi perbuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat member uang kepada Bupati, Walikota atau Gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan mereka.

c) Korupsi nepotistic

Korupsi *nepotistic* merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon.

d) Korupsi subvertif.

Korupsi subvertif berupa pencurian terhadap kekayaan Negara yang dilakukan oleh pejabat Negara. Berbekal kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan Negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversive terhadap Negara, karena

> Negara telah merugikan besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat mengganggu jalannya roda Negara ( Handoyo, 2009:43-44).

Di Indonesia budaya korupsi sudah sangat membudaya bahkan mendarah daging baik korupsi yang dilakukan kecil-kecilan maupun besar-besaran. Menurut Suyahmo (2006:29) penyebab korupsi di Indonesia sifatnya beraneka ragam, yaitu:

a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang mungkin meningkat. Gaya hidup dan kebutuhan para pegawai negeri tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka cenderung malu dan munder apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan yang serba mewah, karena mereka telah dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang terpandang dan hidupnya serba kecukupan. Oleh karena itulah maka para pegawai negeri mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan korupsi.
b. Kebutuhan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau meluasnya korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi sudah menjadi budaya yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendarah daging. Mulai korupsi yang bersifat menyalahgunakan keuangan Negara sampai pada tindakan suap-menyuap. Misalnya membayar sejumlah uang kepada pihak pegawai kelurahan untuk mempercepat pembuatan KTP.
c. Modernisasi, dengan adanya modernisasi maka terjadi perubahan struktur budaya di dalam masyarakat kita yang sebelumnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma tradisional kemasyarakatan yang selalu mementingkan

kepentingan masyarakat menjadi masyarakat modern yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya dan selalu berkeinginan hidup dengan segala kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat. Kondisi semacam ini menjadikan peluang empuk untuk melakukan tindakan korupsi didalam masyarakat.

Kondisi semacam itu akan mempermudah munculnya perilaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat banyak, namun menguntungkan bagi pihak koruptor.

Menurut Suyahmo (2006:30) akibat buruk atau negatif dari korupsi adalah sebagai berikut:

a) Perilaku korupsi mengindikasikan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan. Dengan adanya korupsi maka rkegiatan pemerintah yang telah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan bias gagal dikarenakan dana operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya.
b) Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan adanya praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa menjadi lebih besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras sembako yang aslinya diberikan secara Cuma-Cuma kepada rakyat miskin, akibat adanya praktik korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras tersebut. Meskipun dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi tindakan ini sudah termasuk akibat dari praktik korupsi.

c) Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai ZZkalangan umum. Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan praktik korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana perbuatan yang tercela.

d) Kalau golongan elit dianggap bersikap korupsi secara luas dan mendalam, maka rakyat kecil tidak akan menjumpai alasan ia pun tidak akan berusaha apa saja yang membawa keuntugan bagi dirinya. Indonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang pemimpin menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang pemimpin melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang sama. Oleh karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan korupsi karena kemunngkinan besar akan dicontoh oleh rakyat kecil.

e) Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya yang menyolok soal pajak. Masyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh negara.

f) Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sikap pejabat-pejabat pemerintah, timbul keinginan akan hubungan khusus guna mengumpulkan “bobot” yang cukup untuk membayar tuntunan yang sama dari golongan lain.

g) Karena korupsi merupakan tindakan tidak adil yang telah dilembagakan terhadap orang dengan sendirinya timbul tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan bersifat fitnah serta rasa sakit hati yang mendalam.

h) Korupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan yang didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat.

Menurut Sudjana, korupsi yang dilakukan secara sistemik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan jasa pelayanan publik yang buruk dan kurang memuaskan. Akibatnya pembangunaan nasional akan terbengkalai karena dana operasionalnya dikorupsi oleh pejabat publik. Hal ini bias dikatakan sebagai dampak tidak langsung dari korupsi. Dampak tidak langsung lainnya adalah hilangnya kepercayaaan masyarakat terhadap pemerintah, adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas (Handoyo, 2009: 59).

Pope mengemukakan bahwa korupsi memiliki daya rusak yang cukup tinggi, alasannya sederhana yakni keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya bagi publik. Dalam hal ini korupsi merupakan tindakan ilegal dan bisa berakibat sebagai perwujudan hilangnya tanggungjawab sosial pada seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan penderitaan sosial. Dengan adanya

korupsi maka masyarakat menjadi tidak amoral karena tidak dapat membedakan lagi mana perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Selain itu korupsi juga dapat menjadikan masyarakat kita sebagai penipu dan menimbulkan ketidakpekaan rasa sosial dan memandang penderitaan masyarakat sebagai hal yang biasa (Handoyo, 2009:59).

Tindakan korupsi dapat berakibat sebagai penghambat pembanginan nasional dan perkembangan kegiatan usaha. Korupsi juga menimbulkan kenaikan biaya ekonomi artinya harga penjualan barang dan jasa menjadi naik karena setiap kegiatan ekonomi harus terlebih dahulu melewati korupsi. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat terutama rakyat miskin sehingga dapat meningkatkan tindakan kriminalitas.

Menurut Suyahmo (2006:36) upaya pencegahan korupsi diantaranya sebagai berikut:

f) Pemberantasan korupsi lewat jalur preventif perlu ditingkatkan
g) Melalui pendidikan moral secara dini baik pendidikan formal maupun informal
h) Memperbarui undang-undang tentang tindak pidana korupsi untuk lebih mempertegas tindakan hukum terhadap para pelakunya
i) Keikutsertaan semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintah
j) Memperbaiki dan menciptakan birokrasi yang bermental jujur dan berkomitmen terhadap kepentingan rakyat

a) Pemberantasan korupsi lewat jalur preventif perlu ditingkatkan, antara lain dengan jalan membentuk suatu badan khusus yang bertugas memberantas korupsi yang meliputi usaha-usaha di bidang preventif yang represif serta menggunakan pendekatan normative yang melukiskan segi-segi lain dari masalah korupsi sebagai masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik. Salah

satu upaya preventif adalah telah dibentuknya suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di samping sebagai upaya represif, lembaga ini juga sebagai upaya preventif karena lembaga ini telah mengkampanyekan visi dan misinya melalui media massa sepertikoran, radio, televisi, dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini telah masuk ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan budaya antikorupsi. Sekarang KPK telah begitu dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat diminta ikut serta membantu KPK dalam rangka upaya memberantas korupsi yang telah membudaya di masyarakat.

b) Melalui pendidikan moral secara dini baik pendidikan formal maupun informal. Dengan adanya pendidikan moral sejak dini maka anak didik diharapkan dapat berperilaku yang baik atau bermoral semenjak pada usia dini. Pendidikan moral ini bisa diterapkan melalui lembaga formal (sekolah) maupun lingkungan informal (keluarga). Di lingkungan sekolah, bentuk pendidikan formal yang bertujuan untuk mencegah korupsi adalah dengan diberikannya pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi di sekolah tentu sangat efektif sebagai upaya edukatif untuk mendidik generasi muda sehingga berkarakter jujur, bermoral, dan dapat bertanggungjawab. Sementara untuk lingkungan keluarga yaitu sejak kecil anak selalu diajarkan untuk berperilaku jujur dan tidak berbohong itu merupakan perbuatan korupsi yang termasuk sifat tercela dan menimbulkan dosa.

c) Memperbarui undang-undang tentang tindak pidana korupsi untuk lebih mempertegas tindakan hukum terhadap para pelakunya. Seiring dengan

pesatnya tindakan praktik korupsi yang terjadi di masyarakat yang beragam jenisnya mulai dari merugikan keuangan Negara sampai pada tindakan grafitasi, maka perlu dibuat peraturan hukum yang baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di dalam kehidupan masyarakat.

d) Keikutsertaan semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang yang mengendalikan pemerintah itu sendiri. Masyarakat diharapkan ikut serta atau berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan secara tidak langsung masyarakat turut serta di dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

e) Memperbaiki dan menciptakan birokrasi yang bermental jujur dan berkomitmen terhadap kepentingan rakyat, sehingga dapat memperkecil terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dengan adanya birokrasi yang jujur dan sesuai dengan kepentingan rakyat maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap citra baik pemerintah dalam meyelanggarakan perintahan.

Menurut MS Mustofa (dalam Suara Merdeka edisi Sabtu,20 Agustus 2005), upaya untuk mengatasi korupsi adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat, disamping itu masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif. Cara-cara yang dilakukan antara lain:

a) Tegakkan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dengan pengertian tersebut maka pelaku tindak kejahatan korupsi harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa harus membedakan kedudukan, pangkat, suku, agama, golongan social, profesi, pendapatan, dan lain sebagainya.
b) Perkecil peluang melakukan korupsi; tindakan kotrupsi dilakukan kerapkali karena ada peluang atau dapat diciptakan peluang. Seseorang mungkin mula-

mula tidak tertarik melakukan korupsi, tetapi karena ada peluang maka orang tersebut ikut serta melakukan korupsi.

c) Patahkan jaringan-jaringan korupsi; tindakan korupsi dilakukan terbukti seringkali dilakukan oleh suatu jaringan yang luas dan teratur rapi dari tingkat bawah, tengah hingga atas. Korupsi dalam pungutan liar disinyalir seringkali merupakan tindakan yang memiliki mata rantai ke atasan. Pihak bawah terkadang melakukan korupsi karena mereka mendapatkan tugas harus memberikan upeti (setoran). Mereka selanjutnya memeras rakyat dan menyampaikan setoran kepada atasan.
d) Kesempurnaan system pengawasan;caranya melibatkan masyarakat dan memberikan saluran pengaduan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat lebih banyak dalam menanggulangi korupsi.
e) Tunjukkan keteladanan pimpinan;bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paternalistik. Dalam masyarakat seperti ini keteladanan pimpinan sangat penting. Unsur pimpinan harus memulai menunjukkan keteladanan untuk tidak korupsi. Jika unsur pimpinan korupsi, maka bawahan cenderung akan mengabaikan jika ditegur atasan.
f) Sadarkan masyarakat agar tidak melakukan korupsi; KPK telah melakukan iklan layanan untuk tidak korupsi, maka hal itu harus diteruskan agar masyarakat luas menyadari bahwa korupsi mempunyai akibat menghancurkan sendi-sendi kehidupan Negara.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk memberantas di Indonesia dapat dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan repesif. Namun dalam hal ini upaya preventif haruslah lebih diutamakan tanpa harus mengesampingkan upaya represif.

Menurut Kwik Kian Gie (2006:32), konsep pemberantasan korupsi cukup sederhana, yaitu:

> “Menerapkan carrot *and stick*. *Carrot* adalah pendapatan neto untuk pegawai negeri, baik sipil maupun TNI dan Polri yang mencukupi untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimipinan, dan martabatnya. *Stick* adalah bila semua sudah dipenuhi dan masih berani korupsi, hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi”.

Dalam upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia sistem preventif harus diutamakan dari pada sistem represif. Apa yang sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula. Korban pasti banyak, termasuk

koruptor dan keluarganya yang jumlahnya ratusan ribu itu. Tidak kurang pentingnya adalah keikutsertaan rakyat dalam memerangi korupsi, dimulai dengan meningkatnya kesadaran hukum, pendidikan dan penerangan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi tetap meluas. Salah satu upaya preventif adalah dengan adanya pendidikan antikorupsi pada anak sejak usia dini baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Jika sejak dini anak didik sudah diajarkan tentang bahaya korupsi maka setelah ia besar menjadi orang yang anti terhadap korupsi (Hamzah, 2005:3).

Lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia adalah:

1) Lembaga pemerintah

a) Lembaga penegak hukum, terdiri dari:

(1) Kepolisian,yang bertugas berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK)

(2) Kejaksaan, yang bertugas dan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus TPK di pengadilan

(3) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),yang bertugas dan berwenang melakukan baik penyelidikan dan penyidikan dugaan TPK, maupun penuntutan kasus TPK di pengadilan khusus tindak pidana korupsi.

b) Lembaga penunjang, lembaga pemerintah yang membantu dalam penegakan hukum. Dalam hal ini lembaga yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi adalah: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bertugas memeriksa dan menetapkan besarnya jumlah kerugian Negara akibat korupsi.

2) Lembaga non pemerintah

Lembaga lain (non pemerintah) yang dapat membantu Negara dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain:

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian dalam upaya pencegahan dan pemantauan penanganan korupsi, serta ICW (Indonesia Corruption Watch), forum 2004, IPW (Indonesia Procuremen Watch), Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi(GN-PK), kemitraan (partnership for government reform of indonesia), Aliansi Antikorupsi Semarang.
b) Lembaga Keagamaan,seperti Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), NU (Nahdatul Ulama),dan sebagainya.
c) Media Massa, seperti radio, televisi, dan penerbitan, yang giat berkampanye antikorupsi (Modul Pembelajaran Antikorupsi-Buku 1).

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan hukum (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan) (KPK, 2006:31).

Menurut Handoyo (2009 :25), berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah antikorupsi meliputi:

a) Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemukla agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan yang tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak mesyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.
b) Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku dan etnik keloyalitas bangsa.
c) Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi.
d) Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan.
e) Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap (responsif) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah antikorupsi untuk memperbaiki manusia, salah satunya adlah dengan cara memperbaiki moral, karena moral merupakan hal yang pokok dan paling mendasar di dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan. Jika moral seseorang baik maka perbuatan dan tingkahlakunya juga baik pula, demikian juga sebaliknya.

Pope (dalam Handoyo, 2009:25), menyarankan hal-hal berikut agar upaya antikorupsi dapat mencapai keberhasilan, yaitu:

a) Kemauan yang teguh dipihak pemimpin politik untuk memberantas korupsi di manapun terjadi dan untuk diperiksa.
b) Menekankan pencegahan korupsi dimasa datang dan perbaikan sistem.
c) Adaptasi undang-undang antikorupsi yang menyeluruh dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai integritas.
d) Identifikasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi dan meninjau kembali undang-undang terkait dan prosedur administrasi.
e) Program untuk memastikan bahwa gaji pegawai negeri dan pemimpin politik mencerminkan tanggungjawab jabatan masing-masing dan tidak jauh berbeda dari gaji di sektor swasta.

f) Menelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi beresangkutan cukup mampu berfungsi sebagai penangkal korupsi.
g) Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil.
h) Menjadikan korupsi sebagai perbuatan beresiko tinggi dan berlaba rendah.
i) Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah yang memperkecil resiko bagi orang-orang yang terlibat dalam korupsi "kelas teri", dan yang mendapat dukungan dari tokoh-tokoh politik, namun dilihat oleh masyarakat luas sebagai program yang adil dan tidak masuk akal bagi situasi yang ada.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya antikorupsi dapat mencapai keberhasilan apabila adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di dalam mencegah dan memberantas budaya korupsi yang sedang melanda Negara kita ini.

Menurut Handoyo (2009:27-32), nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk dibangku TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi antara lain:(1) kejujuran, (2) tanggungjawab, (3) keberanian, (4) keadilan, (5) keterbukaan, (6) kedisiplinan, (7) kesederhanaan, (8) kerja keras, dan (9) kepedulian.

## B. Pendidikan Antikorupsi

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*).

Driyarkara mengemukakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia atau membantu proses hominisasi dan humanisasi membantu orang mudah untuk semakin menjadi manusia yang berbuadaya tinggi dan bernilai tinggi. Bukan hanya hidup sebagai manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialisasi. Jadi pendidikan bertujuan membantu manusia muda menjadi manusia yang utuh. Manusia muda dibantu untuk hidup lebih berdasarkan nilai moral yang benar, mempunyai watak yang baik, hidup bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Manusia muda diharapkan juga menjadi manusia yang peka terhadap kebahagiaan orang lain yang peka terhadap penderitaan orang lain dan rela membantu orang lain (Suparno, 2002:21).

Philip H. Commbs mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipilih menjadi tiga, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terprogram, tidak bersetruktur, berlangsung kapanpun dan dimanapun juga. Pendidikan formal

adalah pendidikan berprogram, berstruktur dan berlangsung di sekolah. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang berstruktur, berprogram dan berlangsung diluar sekolah (Munib, 2004:76).

Ki Hajar Dewantara dalam konggres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan: pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Jadi pendidikan itu pada umumnya bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti dan daya pikir pada anak agar dapat hidup selaras sesuai dengan dunianya (Ihsan, 2008:5).

Secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggungjawab dan bersosialisasi. Pendidikan ini dapat dilakukan oleh lembaga sekolah (formal) maupun lingkungan keluarga (informal) dan masyarakat (non formal).

Dalam setiap kegiatan pendidikan hampir selalu melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu(1) peserta didik, (2) pendidik, (3) tujuan, (4) isi pendidikan, (5) metode, dan (6) lingkungan (Munib, 2004:4).

Dasar atau landasan hukum penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

1) Landasan idiil :Pancasila
2) Landasan konstitusional :UUD 1945
3) Landasan opersional :UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Umar Tirtaraharja dan S.L.La Sula (2005:33-36), mengemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya berikut ini.

1) Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.dalam hal ini proses transformasi budaya hanya ada pada suatu lingkungan budaya tempat tinggalnya. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan, dan anjuran serta ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makan, istirahat, bekerja, perkawinan, bercocoktanam,dan seterusnya. Lama-kelamaan bayi tersebut tumbuh menjadi dewasa dan beradaptasi sewsuai dengan lingkungan masyarakat tempat ia dilahirkan.

2) Pendidikan Sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembetukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Melalui pendidikan maka kepribadian seorang anak akan

terbentuk dengan sendirinya. Pembentukan kepribadian ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

3) Pendidikan Sebagai Suatu Penyiapan Warga Negara

Pendidikan sebagai proses penyiapan warga Negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik menjadi warga Negara yang baik. Tentu saja baik disini bersifat relatif, tergantung kepada tujuan dari masing-masing bangsa, oleh karena masing-masing bangsa mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda.

4) Pendidikan Sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Fungsi pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja ini sangatlah penting karena sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Dengan bekerja maka seseorang dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya sehingga mencapai tingkat kesejahteraan. Di dalam memilih suatu pendidikan maka seorang calon didik selalu mempertimbangkan kompetensi yang ada di lembaga pendidikan kemudian disesuaikan dengan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya.

Secara umum pendidikan dapat berfungsi sebagai upaya untuk memanusiakan manusia Indonesia yaitu menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan pendidikan maka potensi-potensi yang ada dalam diri dirinya digali dan dikembangkan agar memiliki kekuatan lahiriyah dan batiniyah sehingga mampu mengendalikan diri, berkepribadian, berwatak, bermoral, bertanggungjawab dan berakhlak mulia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tujuan pendidikan, umumnya ada empat jenjang yaitu:

1) tujuan umum pendidikan nasional ialah manusia Pancasila;
2) tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan pendidikan tingkat SD berbeda dari tujuan pendidikan tingkat menengah,dan seterusnya;
3) tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Misalnya tujuan IPA, IPS, atau Matematika. Setiap lembaga pendidikan untuk mencapai institusi onalnya menggunakan kurikulum. Kurikulum mempunyai tujuan yang disebut tujuan kurikuler;
4) tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Tujuan pokok bahasan disebut tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan sub pokok bahasan disebut tujuan instruksional khusus (TIK). TIK merupakan tujuan yang terletak pada jenjang terbawah dan paling terbatas ruang lingkupnya (Umar Tirtaraharja dan S.L.La Sula,2005:39).

Sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui pendidikan disemaikan pola pikir, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam sebuah masyarakat.

Dalam konteks sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat, terdapat tiga pandangan untuk menyoal hubungan antara sekolah dengan masyarakat, yakni *perenialisme,esensialisme,* dan *progresivisme*. Pandangan *perenialisme,* sekolah bertugas untuk mentransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada setiap peserta didik, agar peserta didik tidak kehilangan jati diri dan konteks sosialnya. *Esensialism*e melihat tugas sekolah adalah menyeleksi nilai-nilai sosial yang pantas dan berguna untuk ditransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada peserta didik sebagai persiapan bagi perannya di masa depan. Peran sekolah yang lebih maju ada pada *progresivisme* yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan (*agent*

*of change*) yang tugasnya adalah mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik yang akan mengantarkan peran mereka di masa depan.

Belajar dari pengalaman Negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diikuti oleh pendidikan antikorupsi. Salah satu dilaksanakannya pendidikan antikorupsi adalh yang dilaksanakan di Negara China. Melalui *China on line* (jawa post,30/7/2005) diketahui bahwa seluruh siswa dijenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran antikorupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan "vaksin" kepada pelajar dari bahaya korupsi. Adapun jangka panjangnya adalah generasi muda China biasa melindungi diri di tengah gemparan pengaruh kejahatan korupsi.

Menurut Azyumardi Azra (dalam Suara Karya Online, edisi 30 Agustus 2006) perlunya penanaman nilai antikorupsi di lembaga pendidikan ialah agar siswa lulus dan kelak sudah di masyarakat dapat membedakan mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan sehingga mampu menghindarkannya.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan masyarakat usia dini. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada penddikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan non formal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun demikian, karena otoritas yang demikian dan kultur yang dipunyai jalur formal atau sekolah

dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi (Handoyo, 2007:13).

Pendidikan sikap antikorupsi merupakan suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai anti atau tidak suka terhadap tindakan korupsi kepada peserta didik sehingga peserta didik bertindak atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.

Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan antikorupsi. Menurut Handoyo (2009:33) tujuan pendidikan antikorupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan (3) pemberantasan ketrampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif menekankan pada aspek mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, biasa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesiskan ide-ide dan materi baru. Domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, yaitu domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan ketrampilan tertentu.

Tujuan Pendidikan antikorupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan (3) pembentukan ketrampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Penanaman sikap antikorupsi merupakan hal yang wajib dan harus ditanamkan kepada anak mulai dari usia diri pada lingkungan sekolah, karena di sekolah maka kepribadian anak akan terbentuk. Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat diterapkan penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti nilai kejujuran, nilai keadilan dan nilai tanggung jawab.

Kejujuran adalah keutamaan yang amat mendasar dalam kehidupan bersama. Untuk bisa bekerja sama maka orang harus bisa saling mempercayai. Sikap kejujuran ini dapat diterapkan dalam kegiatan ulangan yaitu tidak mencontek.

Keadilan merupakan keutaman paling mendasar dalam kehidupan antarmanusia. Keadilan memungkinka manusia menyelesaikan konflik dan perselisihan secara damai dan beradab, karena korupsi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya. Korupsi langsung melanggar haknya. Korups adalah pencurian dan koruptor adalah pencuri. Sejak kecil, anak perlu dididik bahwa mencuri adalah perbuatan memalukan sehingga kemudian hari ia akan merasa malu melakukan korupsi karena ia tahu bahwa ia seorang pencuri.

Orang yang memiliki rasa tanggung jawab tidak akan melakukan korupsi. Ia merasa bertanggung jawab agar tugasnya terlaksana. Misalnya: mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Cara melakukan transformasi nilai kepada generasi muda (siswa sekolah) agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik terutama masyarakat yang bersih dari korupsi. Ada beberapa reka-daya terhadap komunitas sekolah agar antikorupsi yaitu:

c. Pereka-dayaan budaya sekolah yang mengedepankan nilai antikorupsi dengan mempertimbangkan konsistensi aturan sekolah dengan perilaku melalui mekanisme modeling, *reward and punishment* dan keterlibatan seluruh sivitas sekolah pada kegiatan-kegiatan sekolah.
d. Internalisasi nilai antikorupsi dilakukan secara melekat (*embedded*) yang terus-menerus dikawal oleh para guru. Peran guru dalam kegiatan ini adalah mentor. Guru setiap saat membimbing, mengawasi dan membetulkan perilaku yang menyimpang dari jalan lurus antikorupsi.
e. Evaluasi dilakukan secara periodik terhadap program-program internalisasi nilai antikorupsi gunaya memperbaiki reka-daya yang telah dilakukan (Herupuji Winarso dalam situs wawasanpendidikan.wordpres.com diunduh tanggal 15 Januari 2010).

Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat diterapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi sehingga siswa mempunyai sikap dan perilaku yang anti terhadap tindakan korupsi.

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Pendidikan antikorupsi dapat membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada siswa serta menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi sehingga akan memberikan kesadaran kepada generasi muda akan bahaya korupsi dan pada gilirannya mereka akan bangkit melawan korupsi.

Dalam pandangan Harmanto dan Suyanto (2005), materi pendidikan antikorupsi di sekolah antara lain: (1) apa dan dimana korupsi itu, (2) isu moral, (3) korupsi dan hak asasi manusia, (4) memerangi korupsi, (6) korupsi dan hukum, (7) korupsi dan masyarakat demokrasi.

Menurut Harmanto dan Suyanto (2005), implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah agar lebih efektif dalam misinya sebagai pendidikan koreksi budaya perlu memperhatikan hal-hal berikut:(1) pada tingkat materi

ajarnya perlu mencakup tiga domain yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. (2) pada aspek metodologi pengajaran guru dapat menggunakan berbagai metode dan model pengajaran yang sesuai dengan permasalahan dan kematangan siswa. Namun prinsipnya adalah melibatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia juga dianjurkan untuk membuat pembelajaran semakin menarik, (3) pada tingkat sumber belajar perlu digunakan berbagai sumber seperti sumber bahan cetakan (Koran) maupun elektronik (televisi) maupun internet, sumber orang dan lingkungan. Sumber orang dapat berupa tokoh-tokoh masyarakat yang berperan sebagai penegak hukum seperti pilisi, hakim, jaksa, dan KPK, (4)untuk evaluasi kinerja siswa dapat mempergunakan asesmen dan evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur karakter, ketrampilan, kewaspadaan, dan cara berfikirnya dalam mengatasi masalah. Implementasi pendidikan antikorupsi perlu disertai dengan *law enforcemen*, namun tetap dalam konteks edukatif sebagai media menumbuhkan motivasi belajar.

Tim MCW (2005:44) membagi sasaran program pendidikan antikorupsi menjadi dua bagian. Pertama, kelompok inti yang terdiri dari perorangan maupun kelompok yang peduli terhadap aktivitas perjuangan antikorupsi yang mempunyai basis massa homogen dalm suatu komunitas tertentu, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok PKL, rakyat miskin kota, mahasiswa, komunitas pengangguran, komunitas buruh, dan pelajar yang selama ini mereka selalu termarginalisasi oleh sistem yang dikembangkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, kelompok antara yang terdiri dari perseorangan

maupun kelompok yang peduli terhadap aktivitas perjuangan antikorupsi yang merupakan jangkar dari kelompok inti, seperti LSM, mahasiswa, kelompok-kelompok menengah lainnya yang konsen terhadap nasib masyarakat akibat tindakan dari beberapa orang atau kelompok yang mempunyai hobbi korupsi uang Negara yang notabenenya adalah uang untuk pembangunan masyarakat.

SMP Keluarga Kudus merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan pendidikan antikorupsi. Pendidikan sikap anti korupsi diberikan sebagai bentuk praktik. Pada prinsipnya pendidikan antikorupsi lebih menekankan praktek anti atau menolak korupsi dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya agar siswa terlatih untuk tidak korupsi.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menerangkan kebenaran (Rahman, 1999:2). Penemuan kebenaran meliputi kegiatan penelitian yang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2002:6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud: memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Alasan menggunakan pendekatan ini adalah:

1. Dengan pendekatan kualitatif maka penelitian melakukan penelitian pada latar ilmiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengamati pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.
2. Dengan pendidikan kualitatif tidak ada teori yang apriori artinya peneliti dapat mempercayai apa yang dilihat sehingga bisa sejauh mungkin menjadi netral. Dalam hal ini, peneliti mengamati dan

mencatat semua data yang ada dengan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahi.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Keluarga Kudus yang berlokasi di jalan Yos Sudarso No. 234 Kudus.

## C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan berfokus pada pelaksanaan pendidikan sikapantikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Secara lebih khusus penelitian ini diarahkan pada:

1. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus, meliputi bentuk-bentuk, cara, media, sarana dan prasarana di dalam kegiatan antikorupsi.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus, meliputi tenaga, biaya, sanksi, partisipasi siswa, sarana dan prasarana, dan lingkungan.

## D. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek di mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya. Dalam hal ini adalah keterangan yang diberikan responden yaitu kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa SMP Keluarga Kudus dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, buku, majalah ilmiah, surat kabar dan internet.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau responden (interview) (Arikunto, Suharsimi, 2002:155). Dalam hal ini dilakukan kepada Kepala Sekolah, guru dan siswa di SMP Keluarga Kudus serta tenaga pendukung seperti karyawan sekolah.

### 2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999:7). Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

**3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1999:96).

Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen tentang presensi siswa, jadwal pelajaran, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya.

**4. Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data dengan cara telaah pustaka yaitu denga cara menentukan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan (Rachman, 1999:44).

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara memanfaatkan buku, literatur ataupun hasil penelitian karya orang lain yang sangat diperlukan guna menambah bobot ilmiah penelitian ini, di samping dapat menambah cakrawala dan wawancara bagi peneliti dan penulis.

## F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitia kualitatif. Dalam kriteria keabsahan data salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan, sebagaipembanding terhadap data itu. Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2002:178) menyimpulkan triangulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat orang atau kelompok.
4. membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan cara sebagai berikut yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan dalam bagan triangulasi sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Triangulasi

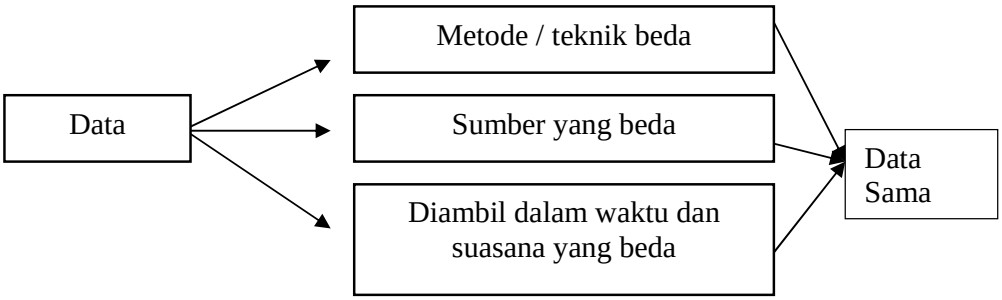


**G. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mensyaratkan data ke dalam pola, kategoris dan satuan ukuran dasar sehingga ditemukan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Penelitian ini, menggunakan metode analisis interaksi untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif, dan data tersebut diolah dengan model interaksi. Langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan untuk dipilih yang dapat digunakan.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikandan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul, data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya.

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

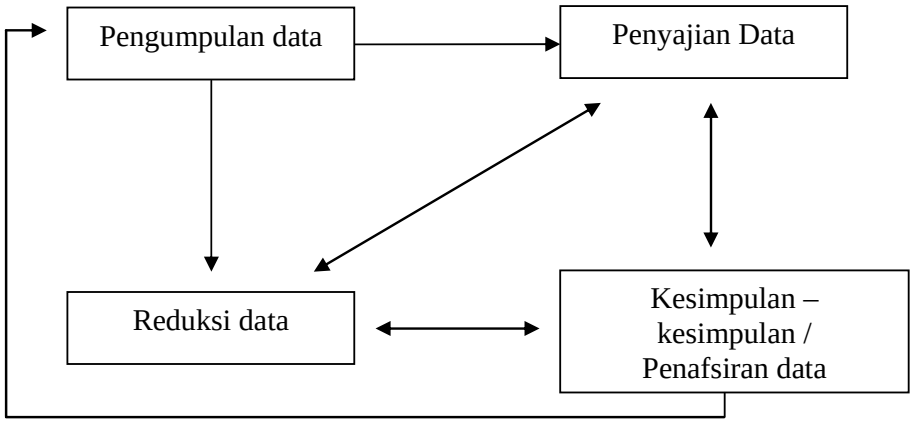


Sumber : Miles dan Huberman, 1992 : 20

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dangan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena banyaknya data yang dikumpulkan maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

## H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 tahap.

1. Tahap pra Penelitian

   Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi instrumen penelitian dan membuat surat perijinan.

2. Tahap Penelitian

   a. Pelaksanaan penelitian yaitu mengadakan observasi pendahuluan di SMP Keluarga Kudus.

   b. Pengamatan secara langsung yang dilaksanakan di SMP Keluarga Kudus mengenai pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

   c. Kajian Pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku.

3. Tahap Pembuatan Laporan

   Dalam hal ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk dalam suatu laporan hasil penelitian.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum SMP Keluarga Kudus

#### a. Letak geografis SMP Keluarga Kudus

SMP keluarga Kudus merupakan salah satu SMP swasta yang berada di kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis SMP Keluarga Kudus adalah $06^0$ 47' 45. 48"S dan $110^0$ 51' 11.77"T. lokasi SMP Keluarga Kudus adalah di JL.Yos Sudarso No.234 desa Kaliputu kecamatan kota dan kabupaten Kudus. Sekolah ini memiliki luas bangunan 1.720 $m^2$, luas halaman 1875$m^2$ dan luas kebun 210$m^2$. Di depan gedung sekolah masih ditumbuhi pepohonan yang rindang sehingga memberikan kesan kesejukan dan keasrian di lingkungan SMP Keluarga Kudus, hal ini dapat menciptkan suasana belajar yang kondusif.

#### b. Sejarah SMP Keluarga Kudus

Sebagai daerah industri, terutaman rokok kretek, pembangunan awal SLTP Keluarga Kudus tidak dapat dipisahkan dari sektor swasta. Terutama sekali peran pabrik rokok Djarum dan Nojorono. Juga tidak kalah pentingnya sumbangan berbagai donator perorangan, yang sampai sekarang masih besar.

Cikal bakal pendiri SLTP Keluarga dapat ditelusuri mulai tahun 1950 dan tidak terpisahkan dari adanya SD Kanisius. Ketika itu Pastor Komen, MSF dalam karyanya di Kudus melihat peran pendidikan katolik belum ada.

Sebagai seorang pastor yang peduli terhadap pendidikan, beliau ingin mendirikan SD. Mengapa dipilih SD? Karena dasar pendidikan seorang anak dibentuk dari SD.

Pada tahun itu didirikan SD Katolik yang menenpati gedung susteran di Jl.Jend.Sudirman, sekitar 300 meter sebelah timur alun-alun simpang 7 Kudus. SD Katolik pertama di Kudus ini diluar dugaan mendapat sambutan hangat dari masyarakat, khususnya umat Katolik. Berbagai sumbangan terus mengalir, yang paling penting adalah banyak keluarga mempercayakan pendidikan anak-anaknya di SD Katolik.

Pada masa itu juga sudah dipikirkan, untuk apa bangunan SD itu pada siang harinya. Setelah dipertimbangkan dengan masak Pastor Komen MSF memutuskan agar siang harinya gedung itu dipergunakan untuk SLTP. Akhirnya tanggal 1 agustus 1950 padaa tahun ajaran 1950/1951 resmi berdiri SMP katolik pertama di kudus yang diberi nama SMP Kanisius Keluarga Kudus, dengan staf pengajar sebagai berikut:

- Bpk. AJ.Soepeket sebagai kepala sekolah
- Bpk. Soeroso mengajar ilmu hayat
- Bpk. Darmo mengajar bahasa jawa
- Bpk. Siswo Pidanoto mangajar bahasa Indonesia
- Bpk. Tan Kok Hie mengajar bahasa Inggris
- Bpk. Go Toe Hok mengajar ilmu alam

Tahun 1956 SMP Keluarga Kudus memasuki babak baru. Dengan tercapainya kesepakatan antara pengurus lokal SMA Keluarga Kudus

dengan yayasan Keluarga di Semarang. Intinya: SMP kelurga Kudus pindah kejalan Pramuka 334 sedang SMA keluarga Kudus dibuatkan tambahan gedung di komplek gereja. Mengingat perkembangan SMP Kelurga Kudus sangat pesat, oleh kepsek Bpk. F.Tan Kok Hoey yang menggantikan Bpk.Soepeket, jati diri SMP Kelurga Kudus semakin Nampak. Di lokasi yang baru SMP Keluarga Kudus menempati 12 rungan kelas. Gedung menghadap ke selatan memanggu jalan besar yakni Jl.Pramuka.

Secara berangsur-angsur pertambahan baik guru maupun siswa terus meningkat. Selama 13 tahun dari 1962-1974, SLTP Keluarga Kudus Menempati 9 lokal kelas. Jumlah siswa berkisar antara 307-412 setiap tahunnya. Ketika itu kepala sekolah dijabat oleh Bpk. RW.Siswaka (1961-1991). Pertambahan siswa ternyata tidak diimbangi oleh pertambahan kelas. Maka pada tahun 1975 ada satu kelas harus menempati lokal di komplek gereja bersama SD. Sementara itu SMA Keluarga Kudus sudah pindah di lokasi baru yaitu di Jl. Yos Sudarso, kaliputu. Begitu seterusnya sehingga SMP Keluarga Kudus terdiri dari 2 unit, dan mencapai puncaknya dilihat baik dari jumlah kelas dan jumlah guru.

Pada tahun 1985 ada 837 siswa yang bersekolah di SMP Keluarga Kudus dengan 18 kelas dan 32 guru serta 10 karyawan. Sebagai salah satu SLTP swasta di kudus keberhasilan mencapai jumlah murid hampir seribu merupakan kebanbanggaan tak terhingga bagi semua pihak bukan saja yayasan keluarga tetapi lebih luas lagi umat Katolik ternayata mampu berbuat banyak disuatu daerah yang dikenal dengan sembilan walinya.

Melihat perkembangan pendidikan yang membutuhkan suasana yang menyegarkan untuk belajar perlu diadakan perluasan SLTP Keluarga Kudus. Situasi ini tidak didukung suasana belajar di Jl.Pramuka sudah terlalu ramai dan rasanya semakin sempit saja. Maka pada tahun 1985 dicari lokasi baru untuk membangun gedung sekolah. Atas berbagai pertimbangan pilihan jatuh pada sebidang tanah di sebalah selatan agak masuk bangunan SMA Keluarga. Tempat ini agak jauh dari keramaian kota, sekitar 2 km arah utara dari bangunan lama.

Mengingat situasi keuangan kurang mendukung, maka diusahakan berbagai sumbangan dari berbagai pihak. Tampa meremehkan pihak lain, jasa paling besar disumbangkan oleh pabrik rokok Djarum dan Nojorono. Berbentuk pinjaman uang tak terbatas dengan pengembalian tanpa batas juga dan tanpa dikenakan bunga. Sumbangan lain berasal dari konglomerat kakap Bpk.Liem Sioe Liong (Sadono Salim) berupa 3 lokal. Demikian juga dari pemerintah 2 lokal. Akhirnya terwujud bangunan 12 lokal, dilengkapi kantor kepsek dan kantor guru. Tidak dilupa juga kamar kecil dan kamar besar.

Luas tanah seluruhnya 6.850m$^2$, sedang untuk bangunan sekolah 1.729 m$^2$, lapangan olahraga 3.160m$^2$ dan kebun 218,5m$^2$. Bangunan ruang kelas memanjang ditepi selatan menghadap ke utara. Disebelah barat masih ada tanah kosong yang seiap dipakai untuk perluasan baru, di sebelah utara berbatasan dengan SMU Keluarga dan gudang Djarum. Bangunan induk memanjang di bagian selatan kemudian ditambah ruang perpustakaan dan laboratorium di sebelah utaranya.

Mulai tahun 1987 berangsur-angsur dimulai dengan siswa kelas 3 mulai menempati gedung baru. Tahun berikutnya disusul kelas 2 dan akhirnya tahun ajaran 1989/1990 seluruhnya sudah pindah. Selama 3 tahun ada sedikit kesulitan dengan pemisahan kelas tersebut, karena bapak ibu guru harus mondar-mandir dari mengajar di Jl. Pramuka pindah ke Jl.Yos Sudarso yang berjarak lebih dari 2 km. SMP Keluarga Kudus pindah seluruhnya pada tahun ajaran 1989/1990 ke Jl.Yos Sudarso. Sementara itu gedung SMP Keluarga Kudus yang lama di tempat, oleh SD Kanisius.

Perpindahan ke lokasi yang baru justru membawa dampak yang tidak menguntungkan. Berangsur-angsur jumlah siswa yang masuk ke SMP Keluarga semakin berkurang. Memang banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah jauh, tidak aman di jalan, mutu merosot, mahal dan tentu saja bertambahnya SMP negeri di seluruh kabupaten kudus.

Pada tahun 1997 sekolah mendapat tambahan sebuah bangunan berupa rumah penjaga sekolah, tempat sepeda siswa dan kantin. Seiring dengan berkurangnya jumlah siswa maka jumlah tenaga pengajar dan karyawan pun otomatis dikurangi juga, antara lain mengganti para guru dan karwayan yang sudah pensiun.

Mulai 1 juli 1991 kepemimpinan Bpk.RW Siswaka digantikan oleh Bpk. J.Soeparmo yang sudah cukup lama bekerja di SMP Keluarga Kudus. Beliau pekerja keras yang ulet, tekun dan tahan banting. Di bawah kepemimpinannyalah mutu lulusan ditingkatkan. Ini terbukti dari mulai meraih ranking 5 tingkat kabupaten Kudus menjadi ranking 3. Suatu prestasi

yang luar biasa dalam 2 periode kepemimpinan kepala sekolah. Beliau pension pada tahun 1990/2000 jabatan kepsek digantikan oleh Bpk.Y.Sumaryono.

Setelah Paskah 2003, kantor guru, Tata Usaha dan kepala sekolah yang sebelumnya ruang kelas direhab sehingga bener-benar menjadi kantor. Berdasarkan SK no.15/03.19/D.DP/2005 tanggal 5 Desember 2005 SMP Keluarga Kudus terakreditasi A dan saat ini di SMP Keluarga Kudus telah dilengkapi dengan ruang komputer, ruang laboratium Bahasa dan IPA, ruang perpustakaan, ruang gamelan dan band. Saat ini kepala SMP Keluarga Kudus dijabat oleh Bpk. Drs.M.Basuki Sugita.

**c. Visi dan Misi SMP Keluarga Kudus**

Visi dan Misi SMP Keluarga Kudus adalah

1) Visi

"Sumber pembelajaran kreatif dan persemaian siswa yang cerdas, berpikir dan bertindak agar Allah lebih memuliakannya.

2) Misi

- Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kecerdasan dan kreativitas
- Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan sikap persaudaraan, kepedulian, kepekaan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia.
- Menekankan manajemen sekolah yang dapat menumbuhkan suasana kerja yang kondusif dalam kebersamaan.

**d. Keadaan Tenaga Pendidik dan Karyawan SMP Keluarga Kudus**

Jumlah seluruh tenaga pendidik(guru) di SMP Keluarga Kudus adalah 14 orang, salah satu diantarannya ada yang sedang cuti melahirkan. Karyawan di SMP Keluarga Kudus ada 5 orang yang terdiri dari 2 orang pengurus tatausaha, 1 orang penjaga sekolah, dan 2 orang petugas kebersihan**.**

**e. Keadaan Siswa SMP Keluarga Kudus**

Keadaan siswa SMP Keluarga Kudus pada tahun ajaran 2009/2010 digambarkan dalam bagan berikut.

Jumlah Siswa SMPK
Tahun Ajaran 2009/2010

| Kelas | Jumlah Siswa |
|---|---|
| 7A | 37 |
| 7B | 38 |
| 8A | 29 |
| 8B | 28 |
| 9A | 23 |
| 9B | 23 |
| 9C | 23 |
| **Jumlah** | **201** |

Keterangan Agama
Siswa SMPK Tahun
Ajaran 2009/2010

| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Katholik | 104 |
| Kristen | 79 |
| Islam | 10 |
| Budha | 8 |
| **Jumlah** | **201** |

**f. Sarana dan prasarana di SMP Keluarga Kudus**

SMP Keluarga Kudus memiliki 8 ruang belajar, 3 ruang laboratorium yaitu lab.IPA, laboratorium komputer, dan laboratorium Bahasa, ruang olahraga dan ruang kesenian. SMP Keluarga Kudus menggunakan sistem ruang kelas dengan system moving class/running class, artinya penempatan kelas disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Pada mata pelajaran olahraga biasanya menempati ruang olahraga. SMP Keluarga Kudus memiliki lapangan volley, lapangan basket, lapangan pasir untuk lompat jauh dan lompat tinggi, dan lain-lain.

Sarana lain yang dimiliki sekolah adalah, ruang kepala sekolah, kantor guru, kantor TU, perpus, ruang OSIS atau ruang UKS, ruang tamu, toilet, kantin, aula sekolah, rumah penjaga sekolah,taman dan tempat parkir.

**2. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

Pedidikan sikap antikorupsi merupakan suatu proses pendidikan untuk mendidik anak supaya bersikap antikorupsi dan selalu mengutamakan kejujuran. Pendidikan antikorupsi telah diterapkan SMP Keluarga Kudus sejak tanggal 19 Desember 2005. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik anak untuk selalu bersikap jujur dalam segala hal dan tidak mengambil hak orang lain. Pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus lebih menitik beratkan pada praktek kejujuran dalam kehidupan sehari-hari atau lebih bersifat aplikatif.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

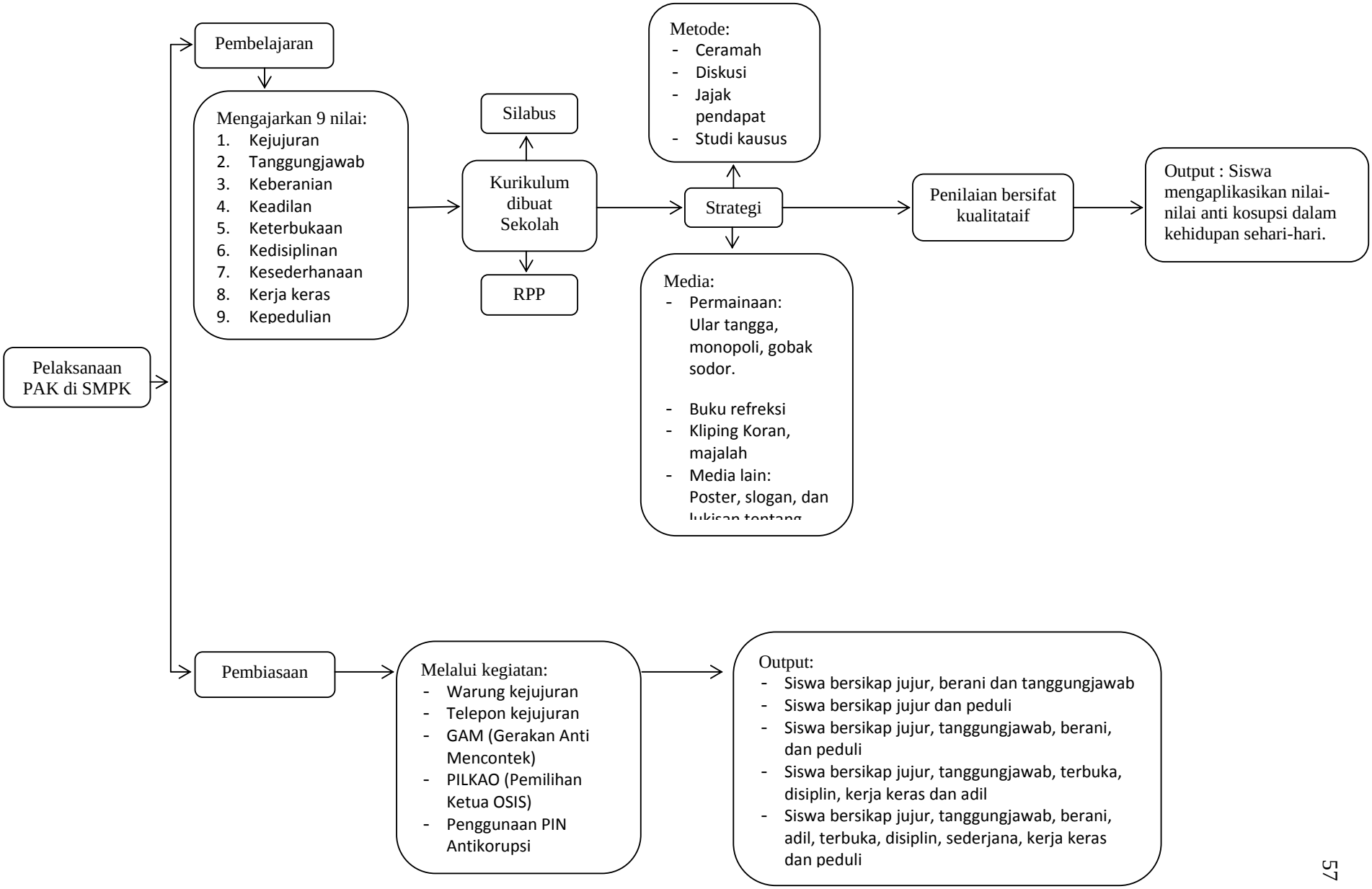

Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus lebih menekankan pada praktik sehari-hari yaitu melatih anak untuk selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi antara lain kejujuran, tanggungjawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian. Oleh sebab itu, pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus melibatkan semua unsur di sekolah mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah. Bentuk-bentuk praktik kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus sebagai berikut.

**a. Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi**

Salah satu bentuk pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah adanya pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Pembelajaran PAK di SMP Keluarga Kudus merupakan mata pelajaran tersendiri dan telah masuk dalam jadwal pelajaran terstruktur yang diadakan setiap seminggu sekali yaitu dilaksanakan setiap hari sabtu pada jam pelajaran ke-3. Alokasi waktu pembelajaran PAK adalah satu jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Setiap kelas diajar oleh wali kelasnya masing-masing.

Sebagai salah satu bukti di SMP Keluarga Kudus ada pelajaran PAK yaitu adanya perangkat pembelajaran seperti silabus (Lampiran 6 ) dan RPP. Silabus dibuat atau disusun oleh guru pengajar melalui musyawarah bersama pada awal tahun pelajaran, sedangkan untuk RPP dibuat oleh masing-masing guru sebelum melaksanakan pembelajaran PAK. Kadang ada guru atau pengajar yang tidak membuat silabus dan RPP. Hal ini dikarenakan pihak

sekolah tidak mewajibkan guru atau pengajar untuk membuat silabus dan RPP, karena PAK merupakan pendidikan nilaiyang lebih mengutamakan praktek keseharian yaitu melatih siswa untuk selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Silabus pembelajaran antikorupsi SMP Keluarga Kudus ( lampiran 6) hanyalah sebagai bukti bahwa di SMP Keluarga Kudus ada suatu pembelajaran antikorupsi dan termasuk mata pelajaran tersendiri. Selama ini silabus PAK belum terdokumentasikan dengan baik. Pihak sekolah tidak mewajibkan guru untuk membuat rancangan pembelajaran seperti silabus dan RPP, karena lebih menekankan pada praktik sehari-hari. Konsep pembelajaran PAK di SMP Keluarga Kudus tergantung pada wali kelasnya masing-masing. Biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran guru menuliskan rencana pembelajaran atau konsep pada selembar kertas mengenai materi yang akan diajarkan.

Materi pembelajaran PAK di SMP Keluarga Kudus berupa konsep tentang korupsi pada umumnya, seperti pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, dan lembaga yang bertugas memberantas korupsi serta bahaya laten dari tindakan korupsi. Materi-materi tersebut telah ada dalam modul pembelajaran PAK, namun dalam pembelajaran PAK boleh keluar dari konsep yang telah ada di modul karena PAK merupakan jenis pendidikan nilai.

Modul PAK terdiri dari 3 buku yaitu buku 1 untuk kelas 7, buku 2 untuk kelas 8, dan buku 3 untuk kelas 9. Modul pembelajaran berisi

mengenai materi ajar, penugasan dan dilengkapi dengan gambar-gambar dan poster anti korupsi yang sifatnya menarik. Selain itu, juga ada modul PAK mengenai panduan untuk guru.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada waktu berlangsungnya pembelajaran antikorupsi di SMP Keluarga Kudus dengan cara diskusi. Dalam praktiknya anak diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak-maraknya di Indonesia yaitu kasus Gayus. Tahap demi tahap anak diajak untuk berpikir kritis untuk menanggapi kasus tersebut. Tahap pertama siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan kasus korupsi tersebut. Tahap kedua siswa diajak untuk untuk berpikir dan menilai akibat dari kasus tersebut. Untuk tahap yang ketiga guru memberikan refleksi ( koreksi diri) dari kasus tersebut. Dalam kegiatan refleksi siswa diajak untuk berani mengambil keras dan pilihan hidup yang benar apabila berada pada kasus tersebut. Dalam pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan siswa berperan aktif menemukan sendiri inti dari pembelajaran.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M. Basuki Sugita, kepala sekolah SMP Keluarga Kudus, bahwa cara untuk mengajarkan sikap antikorupsi adalah dengan cara mengajarkan pada anak untuk selalu berbuat jujur karena anak itu bukanlah malaikat yang tak luput dari kesalahan. Caranya dengan dikembalikan pada diri pribadi masing-masing yaitu kebanggaan untuk bersikap jujur terutama pada diri sendiri (wawancara tanggal 7 April 2010).

Patricia Sih Sanjaya, selaku guru SMP Keluarga Kudus, memberikan penjelasan mengenai cara untuk mengajarkan anak bersikap antikorupsi adalah.

> "Cara untuk mengajarkan sikap antikorupsi pada siswa adalah adalah dengan selalu mengajarkan anak untuk selalu jujur pada diri sendiri dan takutlah pada tuhan sertajanganlah senang /bangga untuk dipuji oleh orang lain tapi banggalah pada diri sendiri karena tuhan melihat semua yang kita lakukan" (wawancara tanggal 7 April 2010).

Dalam mengajarkan anak untuk jujur bisa dimulai dari diri sendiri, Patricia Sih Sanjaya menambahi cara untuk mengajarkan anak untuk jujur adalah:

> ''Caranya dengan refleksi diri yaitu siswa menulis di buku refleksi masing-masing tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama sepekan ini, kesalahan tersebut kita evaluasi dan memberikan masukan-masukan mengenai resiko dan akibat dari perbuatannya tersebut, sehinnga untuk kedepannya nanti siswa disadarkan untuk tidak mengulanginya lagi. Kadang siswa merasa was-was, apakah harus jujur nanti malu dan taku pada bu pat tetapi jika tidak jujur akan mrenambah dosa lagi. Pada akhirnya pun mereka sering jujur karena kami sering memberikan pembinaan mengenai kejujuran" (wawancara tanggal 7 April 2010).

Sedangkan Alfansus Rendi, selaku siswa SMP Keluarga Kudus memberikan penjelasan mengenai cara mengajarkan anak untuk jujur adalah dengan menuliskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam minggu ini. Selain itu, Ananta Mandala, selaku siswa SMP Keluarga Kudus, berpendapat cara mengajarkan anak untuk jujur adalah dengan pembinaan seperti diberikan nasihat mengenai pentingnya kejujuran dan resiko apabila kita tidak jujur (wawancara tanggal 5 Februari 2011).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PAK merupakan salah satu upaya untuk mendidik anak untuk selalu jujur

terutam pada diri sendiri, caranya adalah dengan refleksi diri ( koreksi diri) dan melaliu pembinaan tentang pentingnya nilai kejujuran, karena kejujuran adalah salah satu nilai dari antikorupsi. Jadi pembelajaran antikorupsi di SMP Keluarga Kudus membentuk sikap siswa untuk jujur. Selain itu, juga mendidik anak untuk bersikap berani yaitu siswa berani mengakui kesalahannya meskipun nantinya akan ketahuan oleh guru untuk berbuat kesalahan.

Pembelajaran PAK biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi, jajak pendapat. Dalam ceramah biasanya guru bercerita tentang isi atau materi pelajaran kepada siswa. Menurut hasil wawancara dengan ibu Anastasia, selaku guru SMP Keluarga Kudus memberikan penjelasan mengenai metode ceramah sebagai berikut:

> ”Kalau ceramah biasanya bercerita tentang si kaya dan si miskin yang hidup bertetangga. Si kaya menyuruh si miskin untuk membangunkan sebuah rumah. Selam proses membuatannya si kaya tidak memantau dan ia menyerahkan sepenuhnya pada si miskin. Kadang si miskin mempunyai niat untuk mengkorupsi uang pembuatan rumah dengan dibelikan bahan yang murah, tetapi setelah dipertimbangkan lagi akhirnya ia memutuskan berbuat jujur merskipun tidak ada yang melihatnya. Sampai akhirnya jadilah rumah tersebut dengan bagus dan kokoh. Kemudian si kaya datang untuk melihatnya dan diakhir cerita rumah tersebut diberikan kepada si miskin sebagai hadiah. Dari cerita ini anak-anak diajak berpikir dan merenungkan cerita tadi kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari” (wawancara tanggal 7 April 2010).

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru dalam mengajarkan hidup jujur biasanya dikaitkan dengan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat dengan mudah menangkap materi yang yang disampaikan . selain itu, juga diberikan pengetahuan kalau resiko bila tidak

jujur pasti akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu utamakanlah kejujuran dimanapun dan kapanpun kita berada, meskipun tidak ada yang melihat.

Dalam diskusi guru biasanya menentukan topik yang akan dibahas dalam pembelajaran. Pemilihan topik berkaitan dengan dengan kasus korupsi yang lagi marak berkembang di masyarakat. Sebelum melaksanakan diskusi guru memberikan pengantar, untuk langkah selanjutnya diserahkan pada siswa. Selain menggunakan ceramah dan diskusi, metode pembelajaran PAK kadang menggunakan jajak pendapat. Jajak pendapat di SMP K biasanya menggunakan angket pertanyaan pada selembar kertas kemudian siswa menuliskan pendapatnya pada kertas tersebut. Menurut penjelasan Bapak M. Basuki bahwa di SMP K pernah menggunakan jajak pendapat mengenai Pak Harto sebagai pahlawan atau koruptor. Dalam hal ini anak dimiintai pendapatnya dan dilatih untuk berani mengungkapkan pendapatnya.

Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dan siswa bertugas menemukan sendiri inti dari pembelajaran. Setelah selesai berdiskusi guru menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Setelah selesai diskusi siswa dibimbing oleh guru untuk merefleksikan hasil diskusi kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.

Pada prinsipnya pemilihan metode dan media pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kematangan siswa dan materi yang diberikan. Patricia Sih Sanjaya, memberikan penjelasan mengenai media pembelajaran pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus sebagai berikut:

> “Pada saat PAK di kelas biasanya memakai media permainan untuk kelas 7 seperti ular tangga, monopoli, gobak sodor, sedangkan untuk kelas 8

> memakai media buku refleksi. Untuk kelas 7 media dibuat oleh siswa sendiri sesuai dengan kreativitas dan kemampuan masing-masing mau yang mahal atau murah, bagus atau jelek itu terserah pada mereka. Sementara untuk kelas 8 biasanya menggunakan buku refleksi dan disini guru bersifat mendampingi". (wawancara tanggal 7 April 2010).

Anastasia memberikan penjelasan mengenai metode pembelajaran PAK untuk kelas 3 adalah: Untuk kelas tiga pembelajarannya dengan cara diskusi dan studi kasus, medianya menggunakan kliping koran atau majalah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat mendidik anak untuk bersikap kerja keras dalam membuat tugas yang diberikan oleh guru.

Evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran PAK bersifat kualitatif, penilaiannnya bukan berupa angka tetapi yang dinilai adalah sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan PAK Merupakan pendidikan nilai jadi penilaiannya bukan hanya di dalam pembelajaran di kelas saja., tetapi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti pernah mencontek atau tidak, pernah berbohong atau tidak, pernah membolos atau tidak, dan pernah mencuri atau tidak. Untuk penilaian siswa biasanya dirundingkan dengan para wali kelas, jadi dalam hal ini saling memberikan saran dan masukan.

Di dalam rapor (lampiran 7) pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus masuk kedalam kegiatan pengembangan diri, karena penilaiannya kualitatif maka masuknya ke perilaku. Selama ini guru belum berani memberikan penilaian A B C pada kolom PAK. Hal ini dikhawatirkan jika PAK nya dapat C maka akan berpengaruh pada nilai perilaku . jadi yang

dinilai adalah pada kolom perilaku dapat nilai B. Meskipun di dalam raport tidak ada tulisan A B C tetapi dalam bayangan guru atau wali kelas sudah ada jika siswa ini perilakunya baik atau kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi selama penelitian di SMP Keluarga Kudus banyak ditemukan disetiap dinding kantor guru dan ruang kelas serta di ruangan lainnya ada poster-poster, slogan dan lukisan tentang antikorupsi yang merupakan hasil karya dari siswa.

Sarana dan prasarana digunakan untuk melaksanakan PAK di SMP Keluarga Kudus menurut wawancara tanggal 10 April 2010 beberapa siswa SMP Keluarga Kudus adalah buku-buku antikorupsi di perpustakaan, warung kejujuran dan telepon kejujuran. Menurut hasil wawancara tanggal 7 April 2010 dengan ibu Darmastuti dan ibu Anastasia selaku guru di SMP Keluarga Kudus memberikan penjelasan mengenai sarana pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus yaitu adanya modul pembelajaran dan buku-buku antikorupsi di perpustakaan. Bapak M. Basuki Sugita selaku kepala sekolah SMP Keluarga Kudus juga memberikan penjelasan mengenai sarana pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus yaitu adanya BPS (Buku Pribadi Siswa) yang sulunya adalah KPS (Kartu Pribadi Siswa). Setiap siswa mendapatkan BPS yang didalamnya terdapat catatan kepribadian siswa antara lain mengenai nilai disetiap semester, beberapa kali melanggar tata tertib sekolah dan sebagainya.

Siswa SMP Keluarga Kudus merasa bangga dan senang dengan adanya pembelajaran pendidikan antikorupsi, karena pendidikan antikorupsi

mentransformasikan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Dengan demikian setelah mendapatkan pendidikan antikorupsi maka siswa mempunyai perasaan antikorupsi yaitu jujur, tanggungjawab, berani, adil, terbuka, disiplin, sederhana, kerja keras, dan peduli.

**b. Kegiatan Pembiasaan**

Pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus lebih menekankan pada praktik antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi maka siswa diajarkan terlebih dulu untuk bersikap dan berperilaku antikorupsi karena sikap manusia tidak dibawa sejak lahir melainkan harus dipelajari dan diajarkan serta sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu di SMP Keluarga Kudus selalu dibudayakan bersikap dan berperilaku antikorupsi dalam segala aktivitas dan suasana sekolah. Budaya antikorupsi apabila dilakukan terus-menerus maka akan menjadi pembiasaan sehingga akan muncul kepribadian dalam diri seseorang, begitu juga dengan siswa SMP Keluarga Kudus. Untuk menumbuhkan budaya pembiasaan antikorupsi maka di SMP Keluarga Kudus telah ada toko atau warung ke-jujuran, telepon kejujuran, deklarasi GAM, penggunaan PIN Antikorupsi dan PILKAO.

**1) Warung atau Toko Kejujuran**

Warung atau toko kejujuran merupakan salah satu bentuk praktek kegiatan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus melalui warung kejujuran maka kejujuran akan mulai tumbuh dan dapat dibentuk. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 10 April 2010, dapat disimpulkan bahwa proses

kegiatan di warung kejujuran dilakukan secara mandiri karena tidak ada penjaganya. Mulai dari mengambil barang, membayar dan mengambil uang kembalian semua dilakukan sendiri, disini anak diberi dua pilihan yaitu berbuat jujur meskipun tidak ada yang melihat atau berbuat curang dengan mengambil barang tetapi tidak mau membayar.

Barang-barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari siswa seperti: pensil, penggaris, pulpen, kertas folio,dan lain-lain. Setelah anak membeli barang diharapkan menulis barang pembeliannya dikertas yang telah disediakan, apabila membeli lunas ditulis lunas dan apabila belum punya uang boleh mengebon atau mengutang.

Warung atau toko kejujuran di SMP Keluarga Kudus didirikan pada tanggal 19 desember 2005. Awalnya warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus adalah koperasi sekolah kemudian setelah sekolah melaksanakan pendidikan antikorupsi maka koperasi sekolah diubah namanya menjadi warung atau toko kejujuran. Tujuan didirikannya warung kejujuran adalah untuk mendidik, melatih dan membiasakan anak untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Bpk.M.Basuki Sugita, selaku kepsek SMP Keluarga Kudus, dalam wawancara tanggal 7 April 2010 memberikan penjelasan mengenai warung kejujuran sebagai berikut.

> “Konsep warung kejujuran yang walaupun kecil ini jika dijalankan secara rutin dan benar maka akan melatih mental anak untuk jujur. Saya selalu memberikan penjelasan pada anak kalau warung kejujuran ini dapat diibaratkan sebuah Negara. Kalau warung ini uangnya diambil terus-menerus lama kelamaan akan habis dan menjadi bangkrut, begitu juga

dengan Negara kita ini jika rakyatnya banyak yang korupsi maka Negara lama-lama akan hancur".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa warung kejujuran sebagai sarana untuk mendidika anak untuk bersikap jujur. Warung tersebut diibaratkan sebagai negara, jika uangnya dikorupsi terus-menerus maka uangnya akan habis dan menjadi bangkrut. Melalui warung kejujuran ini dapat membentuk sikap jujur dan tanggungjawab.

Warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus pada saat mulai didirikan kondisinya berbeda jauh dengan kondisi yang sekarang. Pada saat awal berdiri di warung kejujuran ini banyak mengalami kerugian yaitu modal dengan hasil penjualan menunjukkan hasil yang *minus* atau rugi. Lama-kelamaan setelah anak-anak diberikan masukan-masukan, ceramah mengenai pendidikan antikorupsi maka di warung tersebut maka kondisi tersebut mulai menampakkan hasilnya yaitu menuai keuntungan. Bahkan kadang-kadang keuntungannya melebihi dari target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan jika siswa membeli barang dan ternyata masih ada sisa uang kembaliannya tidak diambil. Berikut hasil wawancara dengan ibu Patricia Sih Sanjaya mengenai warung kejujuran sebagai berikut.

''Warung atau toko kejujuran di SMP K ini kondisinya selalu membaik, pada awal berdirinya mengalami kerugian yaitu modal dengan hasil penjualan selalu lebih kecil atau rugi. Seiring dengan berjalannya waktu yaitu anak-anak selalu dibiasakan untuk jujur maka kondisinya warung tersebut menjukkan hasil untung.jika di gambarkan dengan kurva hasilnya selalu mengalami kenaikan terus-menerus. Bahkan sekarang ini jika anak membeli barang dan ternyata masih mempunyai kembalian uang RP 100,00 atau RP 200,00 tidak diambil uang kembaliannya tapi untuk diamalkan di toko kejujuran tersebut"(wawancara tanggal 10 April 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa SMP Keluarga Kudus, bahwa mereka tidak pernah mencuri di warung kejujuran. Berikut hasil wawancara dengan Ananta mandala memberikan penjelasan sebagai berikut:

> ”Membeli barang tetapi tidak mau membayar adalah termasuk mencuri dan mencuri adalah perbuatan dosa. Meskipun tidak ada yang melihat saya selalu membayar apabila membeli di wajur, jika tidak mempunyai uang maka ngebon, nanti kalau sudah mempunyai uang baru membayar”(wawancara tanggal 10 Februari 2011).

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa warung kejujuran dapat membentuk sikap jujur, namun di dalam kenyataan masih juga ditemukan kasus siswa yang tidak membayar di warung atau toko kejujuran meskipun jumlahnya sedikit bahkan jarang. Hal ini terlihat dalam laporan keuangan warung kejujuran. Selain itu warung kejujuran juga membentuk sikap berani dan tanggungjawab. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kevin Pratama, selaku siswa SMP Keluarga Kudus memberikan penjelasan sebagai berikut:

> ’’Pernah ada teman saya yang mengambil barang di warung kejujuran tetapi ia tidak mau membayar, lama-kelamaan akhirnya dia mengakui sendiri kesalahannya kepada wali kelas dan wali kelas tidak memberikan hukuman kepadanya, tetapi hanya memberikan pengarahan berupa nasehat-nasehat mengenai pentingnya kejujuran. Kemudian dia membayar di wajur dan berjanji tidak akan mencuri lagi”(wawancara tanggal 9 Februari 2011).

Berdasarkan dokumentasi dari laporan keuangan warung kejujuran (lampiran 8), bahwa dalam laporan tersebut terlihat bahwa masih ada keterangan uang yang hilang tetapi nilai hasil penjualan menunjukkan hasil yang lebih, hal ini di tuliskan dengan ’’NN”. Dalam hal ini mungkin

dikarenakan siswa lupa menulis atau maemang tidak menulis diukertas bon kalau sudah membayar lunas.

Perasaan siswa SMP Keluarga Kudus setelah adanya warung kejujuran adalah senag dan bangga, karena dengan adanya warung kejujuran siswa telah bersikap jujur dan tanggungjawab. Warung kejujuran sebagai sarana untuk membentuk anak untuk jujur, karena di warung ini anak tidak hanya diberikan teori tetapi dituntut untuk menentukan sikap atau pilihan dan berani mempertanggungjawabkan dari apa yang telah ia pilih.

**2) Telepon kejujuran**

Berdasarkan data dokumentsi dari Koran Radar Kudus, edisi Sabtu 27 Desember 2008 disebutkan bahwa di SMPK berlakukan telepon kejujuran dan seluruh siswa diharamkan membawa HP pada saat jam sekolah. Menurut hasil wawancara tanggal 7 Maret 2010 dengan Bpk.M.Basuki Sugita selaku kepala sekolah SMP Keluarga Kudus, memberikan penjelasan sebagai berikut:

> "Tujuan utama ada larangan bawa HP ke sekolah supaya anak berkonsentrasi belajar. Sebelumnya penggunaan HP di sekolah sering disalahgunakan oleh siswa misalnya beredarnya gambar-gambar porno di HP. Kemudian sekolah mengadakan rapat komite dengan wali murid dan hasilnya ada kesepakatan yaitu bagi siswa SMP Keluarga Kudus tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Selanjutnya berembug dengan para siswa dan hasilnya kebanyakan para siswa tidak setuju dengan adanya keputusan tersebut. Alasan utama mereka adalah kesulitan menghubungi orang tua keinginan dijemput pada waktu pulang sekolah. Lalu timbullah sebuah ide baru bahwa sekolah mendirikan telepon kejujuran dengan cara menyediakan 2 macam HP yaitu GSM dan CDMA. Keputusan ini akhirnya disepakati oleh orang tua siswa. Dengan adanya telepon kejujuran ini, maka siswa dapat berkomunikasi dengan orang tuanya saat ingin dijemput, saat ingin pulang sekolah"( wawancara tanggal 7 Maret 2010).

Tempat telepon kejujuran di MP Keluarga Kudus adalah berada di ruang TU. Disana disediakan 2 ponsel HP yaitu GSM dan CDMA atau telepon rumah. Tarif yang dikenakan bagi pengguna telepon kejujuran di SMP Keluarga Kudus (wawancara tanggal 10 April 2010 dengan Sriwahyuni selaku staff TU) adalah Rp.1000,00 per menit untuk telepon jenis HP atau GSM dan Rp.300,00 permenit untuk jenis telepon rumah atau CDMA.

Sepeti halnya di warung kejujuran, di telepon kejujuran juga disediakan kertas bon, bagi anak yang belum mempunyai uang atau uangnya kurang maka pembayarannya bisa menghutang. Biasanya jika anak yang belum bayar menulis di kertas atau buku bon, kemudian besoknya langsung dilunasi hutangnya. Kebanyakan siswa yang mengutang dikarenakan uangnya habis untuk nmembeli jajan jadi tidak bisa membayar telepon pada hari itu juga,. Kadang ada yang mencicil pembayarannya, misalnya siswa menelepon 2 menit untuk jenis HP maka besarnya tarif yang harus dibayar sebesar RP 600,00. Pada saat itu siswa tersebut baru mempunyai uang RP500,00 maka ia menulis di kertas bon kalau kurang RP 100,00 ,kemudian esoknya langsung dibayar.

Seperti halnya dengan warung kejujuran, kondisi telepon kejujuran pada saat awal berdirinya juga mengalami kerugian. Antara pulsa yang dibelikan dengan telepon yang digunakan tidak seimbang yaitu lebih besar jumlah pulsa yang dibelikan. Hal ini menandakan bahwa kondisi telepon kejujuran pada saat itu mengalami kerugian.disamping itu juga masih banyak siswa yang ketahuan membawa HP ke sekolahan. Setelah diberikan ceramah-ceramah

normatif mengenai nilai antikorupsi dan kadangkala siswa diberikan refleksi secara terus-menerus, maka kondisi telepon kejujuran sudah mulai menampakkan hasilnya. Modal atau pulsa yang dibelikan dengan penggunaan pulsa menunjukkan angka yang lebih besar atau dengan kata lain untung. Selain itu sudah tidak lagi ditemukan siswa yang ketahuan membawa ponsel ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 Februari 2011 dengan beberapa siswa tentang pernah mencuri di telepon kejujuran atau tidak, sebagai berikut:

1. Stevan Kristanjaya, berpendapat sebagai berikut:

   ”Saya selalu memakai telepon kejujuran terutama pada saat pulang sekolah dan kalau ada barang yang ketinggalan misalnya seragam atau buku. Ya saya selalu membayar meskipun tidak ada yang melihat, karena termasuk melaksanakan sikap jujur”.
2. Kevin Pratama, berpenapat sebagai berikut:

   ”Ya pernah memakai telepon kejujuran pada waktu istirahat atu pas pulang sekolah. Selama ini jika memakai telepon kejujuran saya selalu membayar baik ada yang melihat atau tidak karena saya mencoba untuk jujur.

3. Alfansus Rendi, berpendapat sebagai berikut:

   ”Ya kadang-kadang sih memakai telepon kejujuran tetapi tidak terlalu sering, biasanya kalo ada buku yang ketinggalan suruh nganterin orang tua. Jika memakai saya selalu membayar karena kalau tidak membayar adalah dosa. Jika tidak mempunyai uang ya bon dulu nanti kalau sudah mempunyai uang baru membayar.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa siswa mengenai telepon kejujuran, bahwa mereka tidak pernah mencuri di telepon kejujuran, jika menggunakan telepon pasti ia membayarnya dan apabila tidak mempunyai uang maka bon dulu, setelah mempinyai uang baru membayar. Menurut

mereka alasan selalu membayar adalah jika tidak jujur adalah dosa. Jadi dalam hal ini telepon kejujuran membentuk sikap jujur. Meskipun demikian kesadaran untuk membayar bon di telepon kejujuran kadangkala masih rendah, maka kadangkala diberikan suatu peringatan dalam bentuk pengumuman tertulis yaitu pembayaran bon telepon kejujuran paling lambat tanggal sekian, bagi yang mengebon harap segera melunasinya.

Suasana di telepon kejujuran pada saat pulang sekolah, menurut Alfansus Rendi adalah:

> ”Pada saat pulang sekolah biasanya tempat telepon kejujuran selalu antri karena teleponnya cuma ada 2 tetapi pemakainya banyak, meskipun antri tetapi masih disiplinyaitu siswa tetap urut sesuai dengan gilirannya dan tidak ada siswa yang main curang dengan nyerobos duluan.antinya ini tidak terlalu lama karena pemakainya cuma ngomong sebentar saja”(wawancara tanggal 5 Februari 2011).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa telepon kejujuran dapat membentuk sikap kepedulian, karena meskipun antri tetapi siswa tidak egois dan masih juga memikirkan temannya dengan masih tetap urut sesuai dengan gilirannya. Hal ini dikarenakan mereka sama-sama membutuhakan telepon tersebut, jadi mereka lebih mengutamakan sportivitas.

Setelah adanya telepon kejujuran maka siswa SMP Keluarga Kudus merasa telah bersikap jujur, karena di telepon ini siswa diberikan pilihan untuk bersikap jujur atau bermain curang dengan memakai telepon tetapi tidak mau membayar. Jadi dengan adanya telepon kejujuran maka membentuk sikap jujur.

**3) Deklarasi Gerakan Anti Mencontek**

Salah satu contoh dari pembiasaan sikap antikorupsi di lingkungan sekolah adalah pada saat ulangan siswa di dibudayakan untuk tidak mencontek meskipun dalam ulangan tersebut ada atau tidak ada penjaganya. Dengan adanya budaya tidak mencontek akan menumbuhkan kepribadian dalam diri siswa untuk tidak mencontek. Jika dalam diri siswa telah tumbuh kepribadian tidak mencontek maka hal ini menandakan sudah menjadi suatu pembiasaan anti mencotek.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Darmastuti, selaku guru SMP Keluarga, memberikan keterangan mengenai deklarasi GAM, yaitu:

> "Dulu SMP Keluarga Kudus pernah membuat sebuah deklarasi yaitu deklarsi GAM (Gerakan Anti Mencontek). Deklarasi ini dibuat oleh siswa sendiri. Masing-masing kelas membuat kesepakatan sendiri-sendiri mengenai aturan main dan sanksinya.Sanksi yang dikenakan adalah kalau ketahuan mencontek maka nilainya akan dikurangi atau disuruh membersihkan ruangan, atau dianggap gagal / tidak mengikuti ulangan, atau nilainya nol alias tidak dinilai. Hal ini merupakan salahsatu bukti kalau siswa SMP Keluarga Kudus tau persis kalau korupsi itu tak boleh dilakukan dan mereka sangat menentang segala bentuk tindakan korupsi".(wawancara tanggal 10 April 2010)

Bentuk dari deklarasi GAM (lampiran 12) adalah seperti sumpah atau janji siswa untuk tidak akan mencontek. Menurut pendapat Ananta Mandala sebagai berikut:

> "Dengan adanya GAM di SMPK ini saya sangat setuju dan mendukung karena dapat melatih siswa untuk tidak mencontek, hal ini dikarenakan mencontek termasuk tindakan korupsi. Selama ini saya sudah menerapkannya pada diri saya sendiri dulu. Jika mencontek maka resikonya berdampak pada diri saya sendiri yaitu kemampuan otak saya tidak seimbang misalnya kemampuan aslinya dapat 7 tetapi setelah mencontek dapatnya 8. kondisi seperti ini jika dibiarkan maka lama-lama akan menyebabkan ketergantungan untuk selalu mencontek. Jadi

mencontek harus segera saya hentikan”(wawancara tanggal 5 Februari 2011).

Kevin Pratama juga berpendapat sebagai berikut:

”Ya saya setuju dengan adanya GAM di SMP Keluarga Kudus ini dan saya sudah menerapkannya yaitu pada waktu ulangan saya selalu tidak mencontek meskipun pada saat itu tidak ada guru yang menjaganya”( wawancara tanggal 9 Februiari 2011) .

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa GAM dapat membentuk sikap jujur karena siswa tetap tidak mencontek meskipun tidak ada yang menjaga pada waktu ulangan. Selain itu juga ditambahi dengan pendapat-pendapat lain mengenai GAM di SMP Keluarga Kudus adalah:

a) Kevin Pratama menambahi pendapatnya sebagai berikut:

”Pelaksanaan GAM ini harus konsekuen artinya jika ada siswa yang ketahuan mencontek maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yaitu diberikan sanksi yang berlaku seperti nilainya akan dikurangi sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa jika melihat temannya maka sedang mencontek maka wajib melaporkan pada guru”(wawancara tanggal 9 Februari 2011).

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya GAM di SMP Keluarga Kudus dapat membentuk sikap tanggung jawab dan berani.

b) Alfansus Rendi,berpendapat sebagai berikut:

”Jika ada yang mencontek dapat bagus maka kasian juga dengan teman kita yang lain yang tidak mencontek nanti nilai jelek. Hal ini tidak adil rasanya, karena hasil ulangan tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Jika ingin nilai bagus ya sebelumnya belajar dulu dengan sungguh dan jangan dengan cara yang curang yaitu mencontek, tetapi kadang saya sendiri jika mengalami kesulitan menjawab soal dan sudah tidak ada lagi jalan keluar maka saya kepincut untuk mencontek. Meskipun pada akhirnya saya sadar juga kalau mencontek itu tidak baik, tetapi apa boleh buat demi untuk mendapatkan nilai bagus dan membantu orang tua juga”(wawancara tanggal 9 Februari 2011).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa GAM di SMP Keluarga Kudus dapat membentuk sikap kepedulian, adil, dan kerja keras. Namun masih juga ditemukan satu atau 2 dua siswa yang mencontek jika mereka merasa ada kesempatan untuk mencontek. Patricia Sih Sanjaya juga mengemukakan pendapat sebagai berikut.

> ”Ya kadang pada saat ulangan ketika meninggalkan kelas saya juga merasa tidak yakin dan was-was karena ada pepatah yang mengatakan diantara 1000 buah jeruk pasti ada 1 atau 2 buah yang busuk begitu juga dengan siswa. Tetapi dalam hal ini salah satu cara untuk mendidik anak untuk jujur dan nanti lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan untuk tidak mencontek”(wawancara tanggal 10 April 2010).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam paelaksanaan GAM di SMPK masih juga ditemukan siswa yang mencontek. Meskipun masih ada satu atau dua siswa yang melakukan kecurangan yaitu mencontek pada saat ulangan, namun dengan adanya GAM di SMP Keluarga Kudus sudah menampakkan hasilnya yaitu pada saat ujian nasional biasanya yang menjaga atau pengawasnya adalah guru dari sekolah lain. Setelah selasai mengawasi siswa SMP K para pengawas memuji siswa SMP K bahwa pada saat ujian berlangsung siswa banyak yang tenang, tidak tolah-toleh, tidak ada yang mencontek serta serius dalam mengerjakan soal ujian.

Pada praktik pelaksanaan deklarasi Gerakan Anti Mencontek (GAM) di kelas yaitu pada saat ulangan berlangsung guru dengan sengaja meninggalkan kelas. Disini anak diberi dua pilihan yaitu bertindak curang dengan mencontek atau tetap berbuat jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Sebelum meninggalkan kelas guru memberikan pengarahan secara moral bahwa dengan dimanapun kita berada dan apapun yang kita perbuat pasti Tuhan Maha

Mengetahui, meskipun tidak ada manusia lain yang melihat. Jika keadaannya ada anak yang mencontek maka sesuai dengan kesepakatan yaitu harus menjalani sanksi atau hukuman yang telah disepakati misalnya nilainya akan dikurangi. Pada akhirnya lama-kelamaan siswa SMP Keluarga Kudus dengan sendirinya menjadi terbudaya tidak mencontek pada saat ulangan meskipun ada atau tidak ada penjaganya. Pembudayaan tidak mencontek secara perlahan-lahan menjadi suatu kebiasaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian dikelas dapat terlihat bahwa suasana pada saat ulangan itu sangat kondusif atau tenang dan damai. Siswa bersikap tenang dalam mengerjakan soal dan yang paling utama adalah tidak ada satupun siswa yang mencontek semuanya percaya diri dan optimis dalam mengerjakan soal ulangan. Kondisi seperti ini berbeda jauh dengan kondisi sebelum diadakannya pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Pada awal adanya deklarasi GAM juga masih ditemukan 1 atau 2 anak yang ketahuan masih mencontek pada saat ulangan. Kemudian setelah ia mendapatkan sanksi dan teguran-teguran moral atau pembinaan secara terus-menerus maka lam-lama dapat terlihat hasilnya yaitu siswa yang mencontek jarang ditemukan bahkan tidak ada satupun. Hal ini menunjukkan salah satu bukti bahwa GAM (gerakan anti mencontek) dapat membiasakan siswa untuk berbuat jujur.

Dengan adanya Gerakan Anti Mencontek (GAM) maka siswa SMP Keluarga Kudus mempunyai perasaan jujur, tanggungjawab, berani, peduli, adil, dan kerja keras.

**4) Penggunaan PIN Antikorupsi**

Semua anggota sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, siswa dan karwayan SMP Keluarga Kudus diharuskan memakai PIN antikorupsi yang disematkan pada baju/seragam yang dikenakan. Penggunaan PIN antikorupsi dipasangkan pada bagian dada sebelah kanan dan ditempelkan di baju seragam yang dikenakan. Penggunaan PIN antikorupsi merupakan salah satu bukti bahwa di SMP Keluarga Kudus sangat menolak segala sesuatu bentuk korupsi.

Bentuk PIN antikorupsi adalah bundar dengan tulisan didalamnya SMP Keluarga Kudus Antikorupsi.Ananta Mandala, berpendapat sebagai berikut:

> "PIN Antikorupsi ini sebagai simbol kalau siswa SMP K juga gurunya bersifat antikorupsi. Selain itu juga sebagai identitas sekolah kalau SMPK adalah sekolah yang antikorupsi. Bagi siswa PIN ini tidak hanya sebagai simbolik belaka, tetapi mereka sudah menerapkan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari misalnya berbuat jujur.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan PIN Antikorupsi dapat membentuk sikap kejujuran karena PIN tersebut bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai pengingat pemakainya untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

Dengan memakai PIN antikorupsi, maka warga SMP Keluarga Kudus khususnya siswa akan selalu ingat akan bahaya laten dari korupsi. PIN antikorupsi sebagai pedoman atau simbolik dan juga sebagai ikrar atau janji jika pemakainya itu benar-benar menentang tindakan yang berbau korupsi. Jika ternyata ia telah memakai PIN antikorupsi dan ternyata masih melakukan korupsi maka siswa tersebut telah membohongi dirinya sendiri. Dengan

penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pembiasaan memakai PIN antikorupsi maka siswa dapat ingat setiap saat tentang bahaya latennya tindakan korupsi. Contohnya, jika siswa berniat jajan tetapi tidak mau membayar, maka dengan sendirinya ia akan melihat kata-kata atau slogan tulisan yang tertera di PIN tersebut yang disematkan di bajunya, setelah berpikir dan pertimbangan serta perenungan dalam hati maka siswa tersebut akan segera menggagalkan niatnya tersebut. Dengan pembiasaan penggunaan PIN antikorupsi ini siswa tidak hanya diberi pengetahuan normatif antikorupsi tapi siswa juga diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri dan bertanggungjawab atas keputusan yang telah diambil tersebut.

Siswa SMP Keluarga Kudus setelah memakai PIN Antikorupsi maka mempunyai sikap antikorupsi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka siswa mempinyai perasaan antikorupsi antara lainadalah jujur, tanggungjawab, berani, adil, terbuka, disiplin, sederhana, kerja keras, dan peduli.

**5) PILKAO (Pemilihan Ketua OSIS)**

Bpk.M.Basuki Sugita selaku kepala sekolah SMP Keluarga Kudus, dalam wawancara tanggal 7 Maret 2010 menyatakan bahwa salahsatu bentuk kegiatan anti korupsi di SMP Keluarga Kudus adalah adanya PILKAO (pemilihan ketua OSIS) secara langsung. Dalam hal ini secara tidak langsung mengajarkan demokrasi pada anak.

Dalam PILKAO anak-anak dilatih untuk berbuat jujur selama proses pemilihan berlangsung mulai dari penghitungan suara sampai pada penetapan ketua atau pemenangnya dilakukan secara apa adanya atau jujur. Panitia yang bertugas sebagai saksi juga bertindak jujur. Siswa SMP Keluarga Kudus begitu antusias dalam acara tersebut. Mereka selalu mengutamakan kejujuran dan tidak bermain curang. Guru bertindak sebagai mentor dan tidak ikut campur dalam acara tersebut. Semua jalannya acara diserahkan sepenuhnya pada siswa.

Berdasarkan dokumentasi dari buletin oposisi edisi November 2009 dijelaskan bahwa PILKAO dilaksanakan oleh SMP Keluarga Kudus secara rutin. PILKAO dilaksanakan berdasarkan pada asas pemilu Indonesia yaitu "LUBER JURDIL". Ketentuan pemilihannya yaitu mencoblos parta peserta pemilu. Pada PILKAO 2009 diikuti oleh 4 partai yaitu partai garuda, partai angklung, partai kamus dan partai tambah kurang. Pemenang pilkao tahun 2009 dimenangkan oleh partai Garuda, yang mencalonkan Agung Adhi Pietra.S dengan perolehan suara sebanyak 98 suara.

Alfansus Rendi memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah PILKAO di SMP K sebagai berikut:

> ”Mulai dari pemanggilan nama pemilih yang urut absensi dari kelas 7 sampai 8. Pemilih dikasih kartu suara lalu masuk menuju tempat pencontengan. Di tempat ini pemilih berhak menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan dari dan oleh siapapun.Setelah memilih lalu kartu suara dimasukkan ke kotak suara. Selesai memilih pemilih memasukkan jari ke tinta sebagai bukti telah melakukan pemilihan. Setelah selesai maka pemilih meninggalkan tempat pemilihan tapi sebelumnya dikasih permen biar suasana makin semangat dan tidak jenuh. Setelah selesai pemilihan maka dilakukan perhitungan suara, dalam hal ini harus jujur dan konsekuen. Selesai

> perhitungan maka penentuan pemenang sesuai dengan hasil pemilu. Pelaksanaan PILKAO ini jujur semua mulai dari panitia, saksi dan pemilih”(wawancara tanggal 5 Februari 2011).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa PILKAO di SMP Keluarga Kudus dapat membentuk sikap jujur, terbuka, tanggungjawab dan disiplin. Selain itu juga PILKAO dapat membentuk sikap kerja keras dan berani, hal ini sesuai dengan pendapat Kevin Pratama sebagai berikut:

> ”Sebelum menjadi seorang pemimpin ituharus melalui proses yamg panjang dan tidak dengan cara yang instan. Mulai dari ikut LDK, mengadakan kampanye, penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi ketua OSIS, lalu proses pemilihan sampai pada penentuan pemenang dan pelantikan. Semua membutuhkan usah dan kerja keras, disamping itu juga harus mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin”(wawancara tanggal 9 Februari 2011).

Dengan adanya PILKAO maka seolah-olah siswa sedang mengikuti atau mengadakan pemilihan umum (PEMILU) yang layaknya terjadi di Indonesia. Asas yang digunakan dalam PILKAO di SMP Keluarga Kudus juga sama dengan asas PEMILU di Indonesia yaitu asas LUBER JUDIL (langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Dalam PILKAO siswa SMP Keluarga Kudus didikdan dilatih sejak dini menjadi pribadi yang antikorupsi khususnya dalam dunia politik, sehingga setelah dewasa kelak mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan masyarakat yaitu khususnya pada saat ada PEMILU. Pada saat mereka menjadi pemilih kelak diharapkan memilih para kandidat atau calon yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dan tidak terpengaruh oleh segala praktek tindakan yang berbau korupsi seperti *’’money politik*”.

Dengan adanya PILKAO maka siswa SMP Keluarga Kudus mempunyai perasaan jujur, terbuka, tanggungjawab, dan disiplin. Selain itu juga mendidik anak untuk mempunyai sikap kerja keras, dan adil.. Dalam hal ini setelah adanya PILKAO di SMP Keluarga Kudus maka siswa mempunyao perasaan antikorupsi yaitu jujur , terbuka, tanggungjawab, disiplin, kerja keras dan adil.

**3. Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Pendidikan Sikap Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.**

Dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi, SMP Keluarga Kudus tidak lepas dari suatu hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi adalah.

a. Aspek Tenaga

Berikut ini hambatan dalam bidang tenaga yang dihadapi SMP Keluarga Kudus anatara lain:

1) Bosan

Bapak M. Basuki Sugita dalam wawancara tanggal 7 April 2010 mengatakanhambatan yang dihadapi SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan PAK adalah:

> “Kendalanya adalah bosan, karena istilahnya bisa diibaratkan sebagai ulo marani gebuk (bahasa jawa) yang artinya pendidikan antikorupsi ini tidak ada yang menyuruh tetapi malahan menambahi beban saja, toh dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi ini tidak menambah gaji. Tapi dengan adanya pendidikan antikorupsi ini kita dapat mengambil manfaatnya yaitu menumbuhkan sikap jujur pada anak usia dini. Disamping itu kita menjadi bangga terhadap sekolah karena mendapatkan nilai plus dibanding sekolah yang lain”.

2) Guru membutuhkan kreativitas dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan wawancara tanggal 7 April 2010 dengan guru Anastasia selaku guru SMP Keluarga Kudus manyatakan bahwa:

> "Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi butuh kreativitas dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pebelajaran pendidikan antikorupsi sehingga kalau tidak dipersiapkan sebelumnya maka pembelajarannya kadang berhenti atau biasanya kehabisan materi yang akan disampaikan pada siswa".

3) Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi waktunya kurang dan tenaga tidak standar.

Patricia Sih Sanjaya selaku guru SMP Keluarga Kudus memberikan pendapat (dalam wawancara tanggal 7 April 2010) mengenai hambatan dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus sebagai berikut:

> "Hambatannya antara lain yaitu waktu untuk mengurusi anak tidak bisa 24 jam. Guru hanya mengajar di sekoalah saja dan untuk aktivitas selanjutnya tidak bisa mendampingan tersu-menerus jadi tidak tahu apakah yang dilakukan di luar sana itu jujur atau tidak, meskipun di lingkungan sekolah mereka telah menerapkan kejujuran. Selain itu rasanya tidak sebanding atau sepadan atau standar jika seorang guru harus mengurusi 29 anak didik. Dalam hal ini yang diurusi guru yaitu tentang mental dan sikap mental itu tidak tampak dari luar".

b. Aspek Biaya

Dalam wawancara dengan kepala sekolah, beberapa siswa dan karyawan sekolah pada tanggal 7 dan 10 April 2010 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di SMP K Kudus tidak mengalami kesulitan dibidang biaya. Kadang-kadang dengan adanya sarana yang tersedia

seperti warung dan telepon kejujuran yang ada maka pihak sekolah mendapat keuntungan laba dari hasil penjualan warung kejujuran dan pemakaian telepon di telepon kejujuran. Patricia Sih Sanjaya selaku guru SMP Keluarga Kudus dalam wawancara tanggal 7 April 2010 memberikan penjelasan sebagai berikut: “untuk warung kejujuran sekarang ini telah ada perubahan yang meningkat dari tahun sebelumnya kalau digambarkan dengan kurva selalu naik panahnya”.

Memang pada awal didirikan warung kejujuran banyak kerugian tetapi lama-kelamaan menurun bahkan sekarnag ini malahan pihak warung mendapatkan keuntungan lebih. Sekarang jika anak-anak membeli barang dan uangnya masih sisa Rp. 100,00atau Rp. 200,00 kebanyakan tidak diambil pengembaliannya. Dalam hal ini pihak warung kejujurna mendapatkan untuk atau laba lebih.

c. Aspek sanksi

Sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah bagi yang melanggar aturan adalah lebih menekankan pada sanksi moral. Berikut pendapat Patricia Sih Sanjaya selaku guru SMP Keluarga Kudus dalam wawancara tanggal 7 April 2010 mengenai sanksi di SMP Keluarga Kudus yaitu:

> “Disini lebih menekankan pada sanksi moral. Anak selalu diajarkan untuk jujur pada diri sendiri dan takut pada Tuhan dan janganlah bangga dipuji orang lain karena biarlah Tuhan yang memujimu”.

d. Aspek Partisipasi Siswa

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 7 April 2010 dengan ibu Anastasia selaku guru SMP Keluarga Kudus menjelaskan bahwa:

> "Sebagian siswa SMP Keluarga Kudus mengikuti atau aktif dalam kegiatan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan sekolah. Bahkan dulu ketika sekolah mengundang nara sumber dari KPK dan bupati Kudus seperti bapak Tamsil itu anak-anak pada banyak yang bertanya dalam acara tersebut. Pertanyaan mereka ya mengenai kasus korupsi itu".

e. Aspek Sarana dan Prasarana

Ibu Anastasia dan Sri Wahyuni selaku guru dan karyawan SMP Keluarga Kudus memberikan pendapat mengenai hambatan dalam bidang sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus sebagai berikut:

1. Kesulitan bidang kurikulum

   Dalam pelajaran PAK kesulitannya adalah dalam bidang kurikulum karena yang membuat adalah sekolah sendiri.

2. HP terbatas sehingga ada beberapa siswa yang anti menggunakannya.

f. Aspek Lingkungan

Bapak M. Basuki Sugito selaku kepala sekolah SMP Keluarga Kudus (dalam wawancara taggal 7 April 2010 menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan antikorupsi di SMP K Kudus mendapat dukungan banyak orang. Menurut Patricia Sih Sanjaya selaku guru SMP Keluarga Kudus dalam wawancara tanggal 7 April 2010 memberikan penjelasan sebagai berikut:

> "Lingkungan di sekitar sekolah mendukung adanya pendidikan antikorupsi di SMP K Kudus bahkan sekarang ini sudah ada yang menerapkan konsep kejujurna di kantin kejujuran. Dulu biasanya anak bayar dulu baru ambil atau pesan barang, sekarang konsep lain yaitu anak ambil dulu baru kemudian bayar".

## B. Pembahasan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tindakan korupsi sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat bahkan sudah mendarah daging. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun selama ini belum dapat mnembuahkan hasil yang optimal. Oleh Karena itu pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya melalui jalur hokum saja melainkan juga perlu alur preventif (pecegahan) yang salah satunya adalah dengan cara pendidikan karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam upaya pembentukan kepribadian anak.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP K Kudus yang penulis lakukan, maka penulis penulis akan membahas penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus

   Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi akan lebih

efektif apabila diterapkan masyarakat usia dini. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada penddikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan non formal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun demikian, karena otoritas yang demikian dan kultur yang dipunyai jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi (Handoyo, 2007:13).

Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat diterapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi sehingga siswa mempunyai sikap dan perilaku yang antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda antara lain kejujuran, tanggungjawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kerja keras, dan kepedulian (Handoyo, 2009:27-32).

Bentuk pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah adanya pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAK). PAK merupakan suatu mata pelajaran tersendiri yang diberikan satu minggu sekali dengan alokasi waktu satu jam pelajaran atau sekitar 45 menit. Setiap kelas diajar oleh wali kelasnya masing-masing. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru menyusun RPP terlebih dahulu. Namun hal ini tidak wajib karena pembelajaran PAK di SMP Keluarga Kudus lebih bersifat pendidikan nilai yaitu siswa tidak hanya diberikan teori terus-menerus tetapi diharapkan siswa dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Harmanto dan Suyanto (2005) materi pendidikan antikorupsi antara lain:(1)apa dan dimana korupsi itu, (2) isu moral, (3) korupsi dan HAM, (4) memerangi korupsi, (5) korupsi dan hukum, (6)korupsi dan masyarakat demokrasi. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah agar lebih efektif dalam misinya sebagai pendidikan koreksi budaya perlu memperhatikan hal-hal berikut:(1) pada tingkat materi ajarnya perlu mencakup tiga domain yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. (2) pada aspek metodologi pengajaran guru dapat menggunakan berbagai metode dan model pengajaran yang sesuai dengan permasalahan dan kematangan siswa. Namun prinsipnya adalah melibatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia juga dianjurkan untuk membuat pembelajaran semakin menarik, (3) pada tingkat sumber belajar perlu digunakan berbagai sumber seperti sumber bahan cetakan (Koran) maupun elektronik (televisi) maupun internet, sumber orang dan lingkungan. Sumber orang dapat berupa tokoh-tokoh masyarakat yang berperan sebagai penegak hukum seperti pilisi, hakim, jaksa, dan KPK, (4)untuk evaluasi kinerja siswa dapat mempergunakan asesmen dan evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur karakter, ketrampilan, kewaspadaan, dan cara berpikirnya dalam mengatasi masalah

Materi dari pembelajaran PAK di SMP Keluarga Kudus adalah mengenai konsep korupsi pada umumnya seperti pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, lembaga yang bertugas memberantas

korupsi, dan bahaya laten dari tindakan korupsi. Materi-materi tersebut telah ada dalam modul pembelajaran PAK, namun dalam pembelajaran boleh tidak memakai materi yang telah ada di modul. Hal ini dikarenan PAK lebih bersifat pendidikan nilai jadi bukan hanya sekedar dapat menghafal materi belaka tapi lebih dipentingkan sikap siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi.

Evaluasi atau penilaian pembelajaran antikorupsi di SMP Keluarga Kudus bersifat kualitatif, penilaiannya bukan berupa angka, tetapi yang dinilai adalah sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan nilai, jadi penilaiannya bukan hanya di dalam pembelajaran saja, tetapi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti pernah mencontek atau tidak, pernah membolos atau tidak dan pernah mencuri atau tidak.

Sebagai bentuk praktek keseharian dari pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus disediaka toko kejujuran dan telepon kejujuran. Melalui toko kejujuran dan telepon kejujuran maka nilai-nilai kejujuran anak dapat dibina dan dikembangkan. Konsep dari toko dan telepon kejujuran adalah kemandirian artinya semua kegiatan mulai dari membeli dan membayar serta mengambil uang kembalian jika ada itu dilakukan secara sendiri karena tidak ada penjual atau penjaganya. Disini anak diberi 2 pilihan yaitu bermain curang artinya membeli barang tetapi tidak mau membayar atau tetap berlaku jujur meskipun tidak ada yang melihat dan mengawasi. Disamping adanya pembelajaran pendidikan antikorupsi,

telepon kejujuran dan warung kejujuran SMP Keluarga Kudus juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat antikorupsi diantaranya adalah, penggunaan PIN antikorupsi, PILKAO (pilihan ketua OSIS) secara langsung, deklarasi GAM (gerakan anti mencontek).

Cara melakukan transformasi nilai kepada siswa agar bersikap antikorupsi (dalam Winarso, 2010) antara lain:(1) perekadayaan budaya sekolah yang mengedepankan nilai antikorupsi, (2) internalisasi nilai antikorupsi dilakukaan secara melekat yang terus-menerus dikawal oleh guru, dan (3) evaluasi dilakukan secara periodik terhadap program-program internalisasi.

Cara-cara yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengajarkan anak didik atau siswa untuk bersikap antikorupsi adalah dengan mengajarkan anak untuk selalu bersikap jujur dan tidak melakukan kecuranagan, melalui refleksi, dan melalui pembinaan wali kelas. Cara mengajarkan siswa SMP Keluarga Kudus untuk selalu bersikap jujur dan tidak melakukan kecurangan adalah dengan cara dikembalikan pada diri pribadi masing-masing untuk bersikap jujur dan jangan bangga jika dipuji orang lain karena Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Refleksi merupakan koreksi atau evaluasi diri sendiri terhadap apa yang dilakukan khususnya berbuat kesalahan dan tujuannya adalah untuk memperbaiki memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Guru khususnya wali kelas berperan sebagai mentor yang setiap saat bertugas membimbing, mengawasi, dan membetulkan perilaku siswa yang bertindak korupsi.

Dalam hal ini termasuk proses internalisasi nilai antikorupsi secara melekat yang dikawal terus menerus oleh guru.

Cara lain yang dilakukan SMP Keluarga Kudus untuk mengajarkan siswa untuk bersikap antikorupsi yaitu dengan pembiasaan. Seluruh sivitas sekolah dibiasakan untuk bersikap antikorupsi salah satunya yaitu bersikap jujur. Jika anak sudah dibiasakan untuk bersikap jujur maka akan menjadi pembudayaan untuk selalu bersikap antikorupsi di lingkungan sekolah. Dalam hal ini termasuk perekadayaan budaya sekolah mengedepankan nilai antikorupsi.

Media pembelajaran pendidikan antikorupsi untuk kelas 7 memakai permainan Sebagai bentuk praktek keseharian dari pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus disediaka toko kejujuran dan telepon kejujuran. Melalui toko kejujuran dan telepon kejujuran maka nilai-nilai kejujuran anak dapat dibina dan dikembangkan. Konsep dari toko dan telepon kejujuran adalah kemandirian artinya semua kegiatan mulai dari membeli dan membayar serta mengambil uang kembalian jika ada itu dilakukan secara sendiri karena tidak ada penjual atau penjaganya. Disini anak diberi 2 pilihan yaitu bermain curang artinya membeli barang tetapi tidak mau membayar atau tetap berlaku jujur meskipun tidak ada yang melihat dan mengawasi seperti ular tangga, gobak sodor, monopoli dan sebagainya, Sedangkan kelas 8 memakai media buku referensi, dan untuk kelas 9 pembelajaran pendidikan antikorupsi biasanya berbentuk drama, studi kasus, debat dan lain-lain. Selain itu media pendidikan antikorupsi di

SMP Keluarga Kudus adalah poster-poster, slogan dan lukisan tentang antikorupsi yang dipasang di dinding ruangan di SMP Keluarga Kudus seperti ruang guru, ruang kelas dan ruang lainnya. Media tersebut merupakan hasil karya siswa.

Dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi adalah adanya modul pembelajaran PAK dan buku-buku antikorupsi diperpustakaan. Selain itu, juga KPS (Kartu Pribadi Siswa) yang berisi mengenai catatan kepribadian atau kelakuan siswa. Warung kejujuran dan telepon kejujuran juga termasuk sarana dan prasarana dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi karena didalamnya tersedia fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk mendidik siswa untuk bersikap jujur.

Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat membentuk sikap jujur, berani, dan tanggungjawab. Selain itu kegiatan pembiasaan melalui warung kejujuran dapat membentuk sikap jujur, karena di warung ini anak tidak hanya diberikan teori tetapi dituntut untuk menentukan sikap atau pilihan dan berani mempertanggungjawabkan dari apa yang telah ia pilih. Kegiatan melalui telepon kejujuran dapat membentuk sikap jujur dan sikap peduli, karena meskipun pemakaiannya meskipun antri tetapi masih mempedulikan temannya juga sehingga pemakaiannya masih antri sesuai dengan giliran masing-masing.

Dengan adanya Gerakan Anti Mencontek (GAM) dapat membentuk sikap jujur, tangggungjawab, dan berani. Selain itu, juga membentuk sikap peduli, adil, dan kerja keras. Setelah adanya Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO) di SMP Keluarga Kudus membentuk sikap jujur, disiplin, kerja keras, adil dan berani.

Siswa SMP Keluarga Kudus Setelah memakai PIN Antikorupsi maka mempunyai sikap antikorupsi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka penggunaan PIN Antikorupsi memnbentuk sikap jujur, tanggungjawab, berani, adil, terbuka, disiplin, sederhana, kerja keras, dan peduli.

2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus

Dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi SMP Keluarga Kudus tidak lepas dari suatu hambatan karena tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali Tuhan. Hambatan yang dihadapi oleh SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi salah satunya adalah dalam bidang tenaga. Dalam bidang tenaga hambatan yang dihadapi SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan PAK adalah bosan. Sehingga dibutuhkan guru yang kreatif dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran PAK karena kurikulum dibuat oleh sekolah sendiri, dan kurangnya waktu.

Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi kadang kala timbul rasa bosan. Pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus tidak ada yang

menyuruh tapi malahan dapat menambahi pekerjaan saja, bahkan yang melaksanakan pendidikan antikorupsi juga juga tidak akan menambahi gaji para tenaga atau pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Tetapi meskipun demikian, mereka menjadi bangga terhadap sekolah yang mereka ampu karena dengan adanya pendidikan antikorupsi maka dapat mendidik anak untuk selalu bersikap jujur dan bertindak antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari.

Kurikulum pemdidikan antikorupsi dibuat sendiri oleh sekolah, maka didalam pelaksanaannya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus biasanya para guru membutuhkan kreativitas dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran PAK agar pembelajaran dapat menarik dan materi yang disampaikan dapat ditangkap oleh siswa jika tidak dipersiapkan secara matang maka pada saat pembelajaran akan terhenti atau biasanya kehabisan materi. Materi yang disampaikan bukan hanya terpaku pada pada modul pembelajaran saja. Disamping itu, waktu untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi masih kurang. Dalam pendidikan antikorupsi yang ditekankan bukanlah materi belaka tetapi yang diajarkan lebih mengarah kepada sikap mental anak. Sikap tidak dibawa sejak lahir jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Selain itu sikap juga tidak terlihat dari luar jadi sulit menentukan apakah siswa sudah bersikap atau berperilaku baik atau belum.

Aspek sanksi juga menjadi pemicu atau penghambat dalam melaksakan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus, yaitu lebih

menekankan pada sanksi moral. Bagi siswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan sekolah maka diberikan terlebih dahulu sanksi moral. Sanksi moral ini sifatnya tidak begitu tegas. Baik buruknya moral seseorng itu sulit untuk ditentukan dan ditebak oleh orang lain karena sifatnya abstrak jadi tidak terlihat dari luar.

Disamping aspek tenaga dan sanksi, hambatan lain yang dihadapi SMP Keluarga Kudus dalam menjalankan pendidikan antikorupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas di telepon kejujuran yaitu HP terbatas. Di telepon kejujuran hanya disediakan 2 macam HP jadi terkadang ada beberapa siswa yang antri untuk memakainya.

Dilihat dari aspek biaya, partisipasi siswa dan lingkungan tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi, SMP Keluarga Kudus tidak mengalami hambatan biaya baik dalam menjalankan pembelajaran pendidikan antikorupsi, warung kejujuran dan telepon kejujuran serta kegiatan-kegiatan antikorupsi lainnya. Bahkan kadan pihak sekolah mendapatkan keuntungan lebih dari warung kejujuran karena kadang apabila anak membeli barang dan masih ada kembaliannya tidak diambil.

Setiap kali SMP keluarga Kudus menjalankan kegiatan antikorupsi maka siswa SMP keluarga Kudus selalu mengikutinya dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Siswa SMP keluarga Kudus sangat bangga, senang dan mendukung penuh adanya pendidikan sikap

antikorupsi yang diselenggarakan SMP Keluarga Kudus. Disamping itu lingkungan sekitar sekolah sangat mendukung penuh pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Mulai sekarang lingkungan sekolah seperti kantin telah menerapkan konsep kejujuran seperti pada warung kejujuran. Dengan adanya pendidikan antikorupsi maka pihak warga di lingkungan sekolah menjadi percaya penuh kepada siswa SMP Keluarga Kudus.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP keluarga Kudus, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini.

1. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP keluarga Kudus melalui dua bentuk yaitu adanya pembelajaran pendidikan antikorupsi yang dimasukkan dalam suatu mata pelajaran tersendiri di luar Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan seminggu sekali, dengan alokasi waktu satu jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Selain itu juga melalui kegiatan pembiasaansikap antikorupsi di lingkungan sekolah, melalui warung deklarasi GAM (Gerakan Anti Mencontek), pemilihan ketua Osis (PILKAO) dan penggunaan PIN Antikorupsi. Dari kegiatan pembiasaan tersebut nilai-nilai yang berhasil diketahui terbentuk dalam diri siswa adalah nilai jujur, tanggungjawab, berani, adil, terbuka, kerja keras dan peduli. Namun pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus belum bisa menekankan timbulnya nilai-nilai antikorupsi sampai 100% karena dalam prakteknya masih ada dijumpai perilaku yang menyimpang yaitu ada 1 atau 2 siswa yang tidak jujur.
2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah bosan, guru membutuhkan kretivitas dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran PAK karena

kurikulumnya dibuat oleh sekolah sendiri, kurangnya waktu, sanksi bagi si pelanggar aturan sekolah lebih menekankan pada sanksi moral jadi kurang begitu tegas dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diantaranya adalah fasilitas HP di telepon kejujuran jumlahnya terbatas.

## B. Saran

Saran yang peneliti ajukan dalam penelitian tentang pelaksanaan pendidikan sikapantikorupsi di SMP Keluarga Kudus,yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kudus untuk menginstruksikan kepada sekolah lain supaya mencontoh SMP Keluarga Kudus yaitu memasukkan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata pelajaran tersendiri di luar Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Pihak sekolah lebih memperhatikan dan tegas terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Bagi pelanggar selain diberikan sanksi moral, juga harus diimbangi dengan sanksi antara lain seperti membersihkan lingkungan sekolah, denda, dan lain sebagainya.
3. Pihak sekolah hendaknya mendokumentasikan dengan baik perangkat pembelajaran antikorupsi seperti silabus dan RPP.
4. Agar tidak membosankan, maka dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi guru harus selektif, lebih kreatif, dan inovatif dalam menerapkan model, pendekatan, dan metode agar materi dapat tersampaikan dengan baik karena pendidikan antikorupsi merupakan jenis pendidikan afektif atau pendidikan nilai.

5. Pihak sekolah yaitu guru atau wali kelas harus bersikap konsisten, yaitu berani memasukkan nilai mata pelajaran pendidikan antikorupsi dalam rapor.

# DAFTAR PUSTAKA


Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Azhar, Muhammad dkk. 2004. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta:LP3 UMY.

Azra, Azyumardi. 2006. *Perlunya Penanaman Nilai Antikorupsi*. Suara Karya Online edisi 30 Agustus 2006.

Daroeso, Bambang. 1986. *Dasar dan Dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang : Aneka Imu.

Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gie, Kwik Kian. 2006. *Pikiran Yang Terkorup*. Jakarta: Kompas.

Hamzah, Jur. Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Handoyo ,Eko dan Annas, Khoirul.2008. *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Semarang.* Jurnal Integralistik No.2/Th XIX/2008.Semarang: FIS UNNES.

Handoyo, Eko, 2009. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya.

Handoyo, Eko. 2007. *Sekolah Sebagai Agen Pendidikan Antikorupsi*. Makalah di sampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pokja Pendidikan Antikorupsi UNNES Semarang.

Harmanto. 2008. *Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Siswa SMP dan MTs*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2005.

Ihsan, H.Fuad, 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

KPK. 2006. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK.

KPK. 2006. *Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: KPK.

Lubis, Mochtar. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Miles, Mathew dan Huberman, Michail A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munib, Ahmad. 2004. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.

Mustofa, M.S. 2005. *Upaya Mengatasi Korupsi*. Suara Merdeka edusi Sabtu, 20 Agustus 2005.

Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Sugita, M. Basuki. 2008. *Pendidikan Antikorupsi*. Suara Merdeka edisi 09 Februari 2007.

Suparno, Paul.dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.

Suyahmo. 2006. *Korupsi Dalam Perspektif Pancasila*.dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum.Semarang: Rumah Indonesia.

Tim MCW. 2005. *Seri Pendidikan Antikorupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta: kerjasama YAPPIKA dan MCW.

Tirtaraardja, Umar dan Sula, S.L.La. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tunggal, Hadi Setia. 2000. *UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Harvarindo.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahzudik, Niam. 2009. *Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluaga Kudus Tahun 2008*. Semarang: Skrisi S1 UNNES.

Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Modul Pembelajaran Antikorupsi- Buku 1. Diterbitkan oleh Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata bekaerjasama dengan Institute of Social Studies, The Nederland.

Livingnavigations.2009.*Korupsi dan Faktor Penyebabnya*. http://www.transparansi.or.id/pilih=lihataboutcorruption&id=4, 16 Februari 2010

Octavianus, Fanny. 2009. *Korupsi di Indonesia Masih Menonjol di Asia*. http://www.antaranews.com/berita/125861, 16 Januari 2010.

Sugiarto, Rosi. 2009. *Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini*. http://suarapembaca.detik.com/read/2009, 15 Januari 2010.

Wikipedia. 2009. *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*. http://en.wikipedia.org/wiki/korupsi, 16 Januari 2010.

Winarso, Heru Puji. 2008. Pelajaran Antikorupsi di Sekolah? http://wawasanpendidikan.com/2008, 15 Januari 2010.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH

Nama :
Umur :
Jabatan :
Hari/tanggal :

**Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

- Apa yang bapak ketahui mengenai pendidikan sikap antikorupsi?
- Apakah pendidikan sikap antikorupsi sudah diterapkan di SMP Keluarga Kudus?
- Sejak kapan SMP Keluaprga Kudus menerapkan pendidikan antikorupsi?
- Apa yang menjadi alasan diterapkannya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Tujuan apakah yang ingin dicapai di dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana bentuk-bentuk penerapan atau pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi dalam kegiatan di dalam kelas?
- Bagaimana bentuk-bentuk penerapan atau pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi dalam kegiatan di luar kelas?
- Bagaimana bentuk-bentuk penerapan atau pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah?
- Bagaimana cara-cara menerapkan sikap antikorupsi pada siswa SMP Keluarga Kudus?
- Melalui media apa pendidikan antikorupsi dalam kegiatan di dalam kelas di SMP Keluarga Kudus?
- Sarana apa yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi?
- Sarana apa yang disediakan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi?
- Apakah sarana dan prasarana yang disediakan sekolah sudah dapat dimanfaatkan secara optimal dan apakah perlu ada sarana baru untuk menunjang pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Menurut bapak apakah pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus ini telah dapat dikatakan berhasil?

- Bagaimana tolak ukur dari keberhasilan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana cara memotivasi siswa, guru, dan karyawan sekolah agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari?

**Sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap tindakan korupsi**

- Bagaimana sikap siswa Smp Keluarga Kudus terhadap adanya tindakan korupsi yang ada di Indonesia ini?
- Bagaimana sikap siswa terhadap adanya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap adanya tindakan korupsi setelah mendapat pendidikan antikorupsi?
- Bagaiman perilaku siswa SMP Keluarga Kudus di sekolah setelah mendapat pendidikan sikap antikorupsi?
- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus selama diadakan suatu bentuk kegiatan antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas serta kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah?
- Apakah siswa SMP Keluarga Kudus telah mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan SMP Keluarga Kudus sekolah?

**Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

- Apakah di dalam melaksanakan / menerapkan pendidikan sikap antikorupsi SMP Keluarga Kudus mengalami hambatan di bidang tenaga pelaksana / pendukung, misalnya guru dan karyawan sekolah?
- Biaya-biaya yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus apakah mewngalami kesulitan?
- Apakah para siswa  SMP Keluarga Kudus ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Sanksi apa yang diberikan kepada siswa bagi yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Menurut anda apa yang menyebabkan siswa menjadi melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Bagi siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan setelah mendapatkan sanksi apakah mereka jera (kapok) dan tidak akan mengulangi lagi?

- Bagaimana partisipasi siswa / keikutsertaan siswa didalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus
- Apakah kondisi lingkungan sekitar sekolah ada yang tidak mendukung kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU

Nama :
Umur :
Jabatan :
Hari/tanggal :

**Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

- Menurut anda apakah yang dimaksud dengan pendidikan sikap antikorupsi?
- Sejak kapan SMP Keluaprga Kudus menerapkan pendidikan antikorupsi?
- Apa yang melatarbelakangi adanya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Tujuan apakah yang ingin dicapai di dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bentuk-bentuk praktik kegiatan apa saja yang ada di SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di lua?r kelas dan kegiatan intrakurikuler serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah
- Bagaimana cara-cara menerapkan sikap antikorupsi pada siswa SMP Keluarga Kudus? SMP Keluarga Kudus
- Melalui media apa pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SMP Keluarga Kudus di dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi?
- Menurut anda apakah pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus ini telah dapat dikatakan berhasil?
- Bagaimana cara memotivasi siswa agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari?

**Sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap tindakan korupsi**

- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap adanya tindakan korupsi yang ada di Indonesia ini?
- Bagaimana sikap siswa terhadap adanya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap adanya tindakan korupsi setelah mendapat pendidikan antikorupsi?

- Bagaiman perilaku siswa SMP Keluarga Kudus di sekolah setelah mendapat pendidikan sikap antikorupsi?
- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus selama diadakan suatu bentuk kegiatan antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas serta kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah?
- Apakah siswa SMP Keluarga Kudus telah mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan SMP Keluarga Kudus sekolah?

**Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

- Didalam menerapkan / melaksanakan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kabupaten Kudus mengalami kesulitan?
- Menurut anda apakah di dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi SMP Keluarga Kudus mengalami masalah biaya?
- Apakah para siswa SMP Keluarga Kudus ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Sanksi apa yang diberikan kepada siswa bagi yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Menurut anda apa yang menyebabkan siswa menjadi melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Bagi siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan setelah mendapatkan sanksi apakah mereka jera (kapok) dan tidak akan mengulangi lagi?
- Bagaimana partisipasi siswa / keikutsertaan siswa didalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus
- Apakah kondisi lingkungan sekitar sekolah ada yang tidak mendukung kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KARYAWAN SEKOLAH

Nama :
Umur :
Jabatan :
Hari/tanggal :

**Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

- Menurut anda apakah yang dimaksud dengan pendidikan sikap antikorupsi?
- Sejak kapan SMP Keluaprga Kudus menerapkan pendidikan antikorupsi?
- Bentuk-bentuk praktik kegiatan apa saja yang ada di SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dan kegiatan intrakurikuler serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah?
- Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SMP Keluarga Kudus di dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi?
- Menurut anda apakah pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus ini telah dapat dikatakan berhasil?
- Apakah anda selalu mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari?

**Sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap tindakan korupsi**

- Bagaimana sikap siswa terhadap adanya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap adanya tindakan korupsi setelah mendapat pendidikan antikorupsi?
- Bagaiman perilaku siswa SMP Keluarga Kudus di sekolah setelah mendapat pendidikan sikap antikorupsi?
- Bagaimana sikap siswa SMP Keluarga Kudus selama diadakan suatu bentuk kegiatan antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas serta kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah?

**Hambatan-hambatan dalam pelaksanan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

- Apakah selama ada pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus ini anda mengalami kesulitan di dalam bekerja?
- Menurut anda apakah di dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi SMP Keluarga Kudus mengalami masalah biaya?

- Apakah para siswa  SMP Keluarga Kudus ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Sanksi apa yang diberikan kepada siswa bagi yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
- Bagi siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan setelah mendapatkan sanksi apakah mereka jera (kapok) dan tidak akan mengulangi lagi?
- Bagaimana partisipasi siswa / keikutsertaan siswa didalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
- Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus
- Apakah kondisi lingkungan sekitar sekolah ada yang tidak mendukung kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA

Nama :
Umur :
Jabatan :
Hari/tanggal :

**Pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

1. Menurut kamu apakah yang dimaksud dengan korupsi dan sikap antikorupsi?
2. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan sikap antikorupsi?
3. Manfaat apakah yang kamu peroleh dari adanya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
4. Bentuk-bentuk praktik kegiatan apa saja yang ada di SMP Keluarga Kudus dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dan kegiatan intrakurikuler serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah?
5. Melalui cara-cara apa sikap antikorupsi diterapkan pada kamu?
6. Melalui media apa pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
7. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SMP Keluarga Kudus di dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi?
8. Menurut kamu apkah pendidikan antikorupsi dapat dikatakan berhasil?
9. Apakah kamu termotivasi oleh kepal sekolah, guru, dan karyawan sekolah untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari?

**Sikap siswa SMP Keluarga Kudus terhadap tindakan korupsi**

1 Bagaimana sikap kamu terhadap tindakan korupsi yang ada di Indonesia ini?
2 Bagaimana sikap kamu terhadap adanya pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
3 Bagaimana sikap kamu terhadap adanya tindakan korupsi setelah mendapat pendidikan antikorupsi?
4 Bagaiman perilaku kamu di sekolah setelah mendapat pendidikan sikap antikorupsi?
5 Bagaimana sikap kamu selama diadakan suatu bentuk kegiatan antikorupsi baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas serta kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah?
6 Apakah kamu telah mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan SMP Keluarga Kudus sekolah?

**Hambatan-hambatan dalam pelaksanan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus**

1. Menurut kamu apakah dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus para tenaga pendukung misalnya guru dan karyawan sekolah mengalami kesulitan?
2. Menurut kamu apakah di dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi SMP Keluarga Kudus mengalami masalah biaya?
3. Apakah kamu pernah tidak mengikuti kegiatan pendidikan antikorupsi?
4. Apa penyebab kamu tidak mengikuti kegiatan pendidikan antikorupsi?
5. Menurut kamu apakah seluruh anggota di SMP Keluarga Kudus senantiasa melaksanakan sikap antikorupsi di lingkungan sekolah?
6. Apakah kamu pernah tidak menerapkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah?
7. Apakah kamu pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah?
8. Apakah sebelum kamu melanggar aturan tersebut kamu telah mengetahui hukuman / sanksi apa yang akan kamu dapatkan?
9. Bagaimana sifat sanksi yang berlaku di SMP Keluarga Kudus?
10. Setelah mendapatkan sanksi bagaimana sikap dan perilaku kamu selanjutnya?
11. Apakah sarana dan prasarana di sekolah kurang mendukung jalannya kegiatan pendsidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus?
12. Apakah kondisi lingkungan sekolah kurang mendukung jalannya pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi?

**PEDOMAN WAWANCARA TAMBAHAN UNTUK SISWA**

1. Bagaimana cara guru atau wali kelas mengajarkan kamu untuk selalu bersikap jujur?
2. Dalam pembelajaran PAK biasanya guru berceramah tentang apa?
3. Setelah mendapatkan pembinaan mengenai kejujuran apa yang kamu rasakan?
4. Dalam pembelajaran antikorupsi biasanya metodenya diskusi, itu temanya tentang apa?
5. Apakah kamu sudah menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari berikan buktinya?
6. Jika kamu membeli di warung kejujuran pernahkah kamu tidak membayar?
7. Jika kamu membeli di warung kejujuran apakah selalu membayar lunas, jika kamu mengebon berapa lama kamu melunasinya?
8. Jika kamu memakai telepon kejujuran apakah selalu membayar, membayarnya lunas atau ngebon, jika ngebon berapa lama kamu melunasiny, pernahkah kamu tidak membayar! Jelaskan
9. Bagaimana kondisi telepon kejujuran pada saat pulang sekolah?
10. Gerakan Anti mencontek atau GAM
    a) Dengan adanya GAM di SMP K apakah kamu setuju.
    b) Sudahkah kamu menerapkannya, mengapa?
    c) Misalkan pada saat ulangan kalian ditinggalkan oleh guru, apakah kamu tetap mencontek karena tidak ada yang melihat atau tetap jujur
11. PIN Anti korupsi

- Apakah kamu setuju dengan adanya aturan penggunaan PIN Anti korupsi.
- Apakah kamu tau maknanya jika kamu memakai PIN Anti korupsi.
- Bagaimana rasanya jika kamu memakai PIN Antikorupsi.
- Dengan memakai PIN tersebut apakah kamu sudah menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, berikan contohnya.

12. Langkah-langkah jalannya PILKAO di SMPK Kudus yang menunjukan sikap antikorupsi.
13. Bagaimana sikap kamu terhadap adanya korupsi di indonesia.
14. Bagaimana sikap kamu terhadap adanya pendidikan antikorupsi di SMPK Kudus.
15. Apakah yang kamu rasakan setelah mendapatkan PAK.

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

Hari :
Tanggal :
Nma Sekolah :
Judul penelitian:Pelaksanaan Pendidikan Sikap Antikorupsi di SMP Keluarga Kabupaten Kudus

Dokumen-dokumen sekolah

- Profil sekolah
- Daftar presensi siswa
- Daftar guru dan karyawan
- Jadwal pelajaran
- Dokumen perangkat pembelajaran

Dokumen pelaksanaan kegiatan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus

- Foto kegiatan di dalam dan di luar kelas
- Foto kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah

**PEDOMAN OBSERVASI**

Hari :
Tanggal :
Nma Sekolah :
Judul penelitian:Pelaksanaan Pendidikan Sikap Antikorupsi di SMP Keluarga Kabupaten Kudus

| NO | FOKUS PENGAMATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | KONDISI FISIK SEKOLAH<br>a) Letak Sekolah<br>b) Bangunan Sekolah<br>c) Keadaan Lingkungan Sekolah | |
| 2 | SARANA DAN PRASARANA DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN SIKAP ANTIKORUPSI<br><br>a. Jumlah Gedung Sekolah<br>b. Ruang Kelas untuk KBM<br>c. Ruang Warung dan Telepon Kejujuran<br>d. Halaman Sekolah | |
| 3 | PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SIKAP ANTIKORUPSI<br>1. Kegiatan di dalam dan di luar kelas<br>2. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah | |

Kegiatan Antikorupsi di Kudus

Kegiatan cicak lawan buaya

Kegiatan PILKAO

Kegiatan PILKAO

Media pembelajaran PAK: ulartangga antikorups

PIN ANTIKORUPSI

Pembuatan prakarya GUA NATAL
bertema Antikorupsi